

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR, KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Oleh:

**JOSEPH MOTTE**

**L4D 003 062**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR, KOTA SEMARANG**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Oleh :  
**JÖSEPH MOTTE**  
**L4D 003 062**

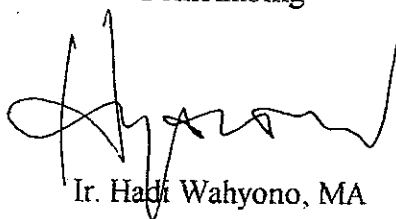
Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 25 Juni 2005

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

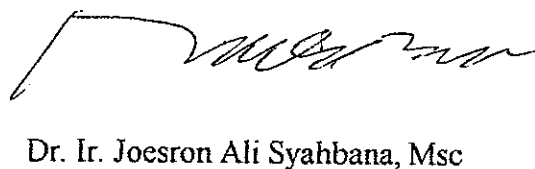
Semarang, 25 Juni 2005

Pembimbing

Pembimbing Utama



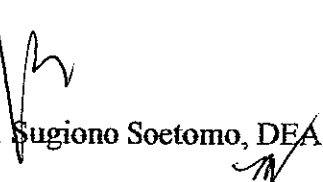
Ir. Hadi Wahyono, MA



Dr. Ir. Joesron Ali Syahbana, Msc

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 25 Juni 2005

**JOSEPH MOTTE**  
NIM L4D003062

Tesis ini ku persembahkan untuk istri dan kedua anakku yang tercinta, serta kedua orang tua yang saya hormati dan adik-adikku

- Maria Inviolata, ST
- Somo dan Yumi
- Bapak Felix dan Ibu Anna
- Ir. Servianus Motte
- Nella Motte
- Maria Motte, Spd Msi (alm)

## ABSTRAKSI

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan kebutuhan masyarakat ini terjadi disegala bidang kehidupan. Adanya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk pembiayaan dalam pembangunan diperlukan perencanaan yang baik.

Sayangnya kecenderungan perencanaan pembangunan yang terjadi dikota Semarang bersifat Top-Down, sehingga terjadi penyimpangan dalam perencanaan dalam pembangunan, sehingga diperlukan perubahan paradigma sistem Top-Down menjadi sistem Terpadu (Top-Down dan Bottom-UP).

Adanya kecenderungan dalam pembangunan yang masih menggunakan paradigma perencanaan Top-Down menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang terjadi dikecamatan Gajah Mungkur diperlukan kajian mengenai variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan pada tahapan seperti apa tingkatan partisipasi masyarakat yang terjadi dilapangan bila dikaitkan dengan "teori Arnstein".

Dengan adanya kajian tentang variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Gajah Mungkur, dapat memberikan masukan rekomendasi kepada pemerintah kota, dan masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat.

## ABSTRACT

Semarang developmental and growth causes the increasing of public needs. The increasing of this public of this needs occur in the whole scope of human live. The existence of public needs and the limitation of governmental expense for funding in development need good plans.

However, unfortunately, Semarang developmental plans intend to be a Top-Down nature, hence, some deviation occur in developmental plans. Therefore, it needs to be changed from Top-Down system into a solid one (Top-Down and Bottom-Up).

Because of intention of the developmental system is still using Top-Down paradigm plans, it causes the lower level of public participation. This low level of public participation in developmental planning discussion that was occurred in Gajahmungkur sub district needed an assessment to variables that influencing the public participation level and the stage of public participation level does it would be in the field if it is correlated to "Arnstein Theory".

Because of the assessment of variables that influencing the level of participation, formation and public participation level in Gajahmungkur sub district, results in recommendation input to governmental city and public towards the importance of public participation.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan Rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang”**.

Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan kerjasama yang baik dan menggembirakan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, Msc, selaku Pembimbing Utama.
2. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku Pembimbing.
3. Mas Janu, Mbak Dindin, Mbak Lulu dan Mbak Linda, yang ikut membantu memberikan support dan pinjaman buku perpustakaan dalam persiapan tesis ini.
4. Sobat Zullkifli dan Saudara Jauh Malik Rayyan, yang memberikan masukan yang berharga demi penyelesaian tesis ini.
5. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Kami sadar dengan berbagai keterbatasan yang ada, produk tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Dari kekurangan dan keterbatasan itulah kami berharap, semoga masih ada manfaatnya bagi pembaca.

Semarang, 25 Juni 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Sasaran Penelitian .....	8
1.3.3 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial .....	9
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial .....	13
1.5 Kerangka Pemikiran .....	16
1.6 Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Studi .....	19
1.6.1 Pendekatan Studi .....	19



1.6.2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian .....	20
1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	21
1.6.4 Metode Analisis .....	26
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian .....	33

## **BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA**

<b>PEMBANGUNAN .....</b>	<b>36</b>
2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat .....	36
2.1.1 Pengertian Partisipasi .....	36
2.1.2 Arti Penting Partisipasi .....	38
2.1.3 Jenis Partisipasi .....	40
2.1.4 Strategi Partisipasi Warga .....	42
2.1.5 Lingkup Partisipasi Masyarakat .....	46
2.1.6 Model Logika yang Mendasari Strategi Partisipasi .....	47
2.1.7 Pengembangan model praktis lingkup partisipasi masyarakat .....	48
2.2 Pemberdayaan Masyarakat .....	50
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan .....	50
2.2.2 Karakteristik Pemberdayaan .....	53
2.2.3 Tahap-Tahap Pemberdayaan .....	53
2.2.4 Sasaran Pemberdayaan .....	54
2.2.5 Peran Warga Dalam Perencanaan .....	55
2.3 Musrenbang .....	57
2.3.1 Pengertian Musrenbang .....	58
2.3.2 Tujuan Musrenbang .....	58
2.3.3 Proses dan Mekanisme Musrenbang .....	58
2.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang .....	62
2.4 Variabel Penelitian .....	63
2.5 Rangkuman Teori .....	63

<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN GAJAH MUNGKUR,</b>	
<b>KOTA SEMARANG .....</b>	<b>66</b>
3.1 Permasalahan Partisipasi Dalam Penentuan Program Strategis di Kota Semarang.....	66
3.1.1 Lingkup Makro Kota Semarang.....	66
3.1.2 Lingkup Mikro Kecamatan Gajah Mungkur .....	67
3.2 Identifikasi Potensi Kegiatan di Kecamatan Gajah Mungkur .....	69
3.3 Keberagaman Kepentingan di Kecamatan Gajah Mungkur .....	70
3.4 Identifikasi Kelembagaan di Kecamatan Gajah Mungkur.....	74
3.5 Proses Pengusulan Program Pada Rakorbangcam .....	76

<b>BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG</b>	
<b>DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR .....</b>	<b>78</b>
4.1 Analisis Karakteristik Penduduk Kecamatan Gajahmungkur .....	78
4.1.1 Jenis Kelamin Penduduk .....	78
4.1.2 Jenis Pekerjaan Penduduk .....	79
4.1.3 Jumlah Anggota Keluarga .....	80
4.1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	82
4.1.5 Jumlah Pendapatan Keluarga .....	83
4.1.6 Kepemilikan Kendaraan Bermotor .....	83
4.1.7 Pengalaman Berorganisasi Penduduk .....	85
4.2 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur .....	86
4.2.1 Menetapkan Fasilitator .....	87
4.2.2 Menyusun Jadwal dan Agenda Musrenbang .....	88
4.2.3 Mempersiapkan Bahan dan Materi Musrenbang .....	89
4.2.4 Mengumumkan Secara Terbuka Tentang Jadwal dan Tempat Musrenbang .....	90
4.2.5 Melakukan Musyawarah/ Rembug Dusun/ RW .....	92
4.3 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur .....	93

4.4	Variabel yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur .....	97
4.4.1	Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Tingkat Pendapatan .....	100
4.4.2	Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pendidikan .....	101
4.4.3	Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengalaman Berorganisasi ...	103
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>105</b>
5.1	Temuan Studi .....	105
5.2	Kesimpulan .....	107
5.3	Rekomendasi .....	109
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I.1</b>	<b>: Penentuan Jumlah Sampel .....</b>	<b>22</b>
<b>TABEL I.2</b>	<b>: Kebutuhan Data .....</b>	<b>23</b>
<b>TABEL I.3</b>	<b>: Variabel Dan Tolok Ukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Kecamatan Gajahmungkur .....</b>	<b>26</b>
<b>TABEL II.1</b>	<b>: Karakteristik Pembangunan .....</b>	<b>43</b>
<b>TABEL II.2</b>	<b>: Efisiensi Dan Pemberdayaan Masyarakat .....</b>	<b>44</b>
<b>TABEL III.1</b>	<b>: Rencana Alokasi Dana P2kp .....</b>	<b>65</b>
<b>TABEL III.2</b>	<b>: Sub Bagian Wilayah Kota Kec. Gajah Mungkur .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b>	: Tingkatan Partisipasi.....	10
<b>GAMBAR 1.2</b>	: Peta Administrasi Kota Semarang .....	14
<b>GAMBAR 1.3</b>	: Kerangka Analisis .....	17
<b>GAMBAR 1.4</b>	: Kerangka Pemikiran Studi .....	17
<b>GAMBAR 1.5</b>	: Tabel Kontingensi B X K Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Berdasarkan Karakteristik Penduduk Kecamatan Gajahmungkur .....	28
<b>GAMBAR 2.1</b>	: Tingkatan Partisipasi Masyarakat .....	37
<b>GAMBAR 2.2</b>	: Tahapan Usulan Proyek Pembangunan .....	58
<b>GAMBAR 3.1</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur .....	69
<b>GAMBAR 3.2</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur .....	69
<b>GAMBAR 3.3</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gajah Mungkur .....	70
<b>GAMBAR 3.4</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur .....	70
<b>GAMBAR 3.5</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur .....	71
<b>GAMBAR 3.6</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajah Mungkur .....	71
<b>GAMBAR 3.7</b>	: Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan Di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur .....	72
<b>GAMBAR 3.8</b>	: Struktur Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan Gajah Mungkur .....	73

<b>GAMBAR 3.9</b>	<b>: Struktur Organisasi: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) .....</b>	<b>74</b>
<b>GAMBAR 3.10</b>	<b>: Proses Rapat Kerja Koordinasi Pembangunan Di Kecamatan .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	: Kuesioner .....	112
LAMPIRAN B	: Tabulasi Data .....	115
LAMPIRAN C	: Crosstabs .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu pembangunan yang berkaitan dengan penelitian partisipasi masyarakat meliputi pembangunan yang berpusat pada manusia, pemberdayaan, mobilisasi, evaluasi dan perencanaan yang partisipasi, tradisi dan praktik budaya, sumbangan uang dan barang, daya beli. (Mikkelsen, 2003). Sejumlah ahli diantaranya Paul, Moses, Mouglin dan Fitzgerald dalam (Abbot 1996) berpendapat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan solusi yang ditawarkan untuk meminimalkan kondisi dikotomis antara keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, dengan adanya kecenderungan semakin beragamnya jumlah dan jenis kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga masyarakat lebih mengetahui kebutuhan dan potensi yang ada di lingkungan mereka. Sementara, proses partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan serta masyarakat itu sendiri. Munculnya kendala dalam proses partisipasi adalah ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan, ketidakmampuan struktur koordinasi serta penilaian tingkat keberhasilan partisipasi (Moses dalam Abbott, 1996).

Ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan dan struktur koordinasi partisipasi dikarenakan masih kuatnya pendekatan perencanaan pembangunan dari atas ke bawah (*top down planning*). Hal ini dapat dilihat dari model struktur administrasi dimana belum adanya administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya, adanya pandangan birokrasi berada diatas rakyat dan rakyat sebagai urusan, diperlakukan sebagai obyek dan untuk menyelesaikan urusan rakyat itu diperlukan



proyek, serta implementasi proyek pembangunan tidak memberdayakan kepentingan rakyat. Sementara tingkat keberhasilan partisipasi dievaluasi berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program pembangunan.

Munculnya paradigma pembangunan partisipasi mengidentifikasi adanya dua perspektif. Perspektif yang pertama, adalah pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat, sehingga menjamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat setempat ikut dipertimbangkan secara penuh dalam pembangunan. Perspektif yang kedua adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan. (Mikkelsen, 2003)

Ada beberapa strategi pendekatan perencanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, hal ini akan sangat tergantung dari peran yang diemban oleh masyarakat (kelompok) dalam perencanaan yang bersifat partisipatif dan diketahui bahwa salah satu alternatif yang dapat memberikan solusi dalam pendekatan pembangunan adalah pendekatan partisipasi.

Pendekatan ini digunakan agar tercapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, adanya komitmen, kerjasama, kesepakatan dan adanya rasa kepemilikan produk pembangunan dari masyarakat, sehingga terpelihara dan terjaga produk pembangunan tersebut.

Produk dari kebijakan pembangunan secara normatif telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten. Rencana ini sebagai acuan untuk penentuan proyek-proyek pembangunan pada suatu wilayah yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun rencana tersebut meliputi RUTRK dan RDTRK. Semua ini merupakan perencanaan yang *bersifat top down* atau perencanaan dari atas ke bawah, pada model perencanaan ini masyarakat bersifat menerima keinginan dari pemerintah, dan masyarakat tidak diikut sertakan dalam perencanaan tersebut. Sedangkan yang diharapkan dalam acuan Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) adanya kesepakatan atau titik temu antara perencanaan yang bersifat *top down* dan *bottom up* dengan melibatkan masyarakat.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom-up and top-down planning*), dari bawah dimulai dari tingkat kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten/kota, ke propinsi sampai ke tingkat nasional, sedangkan dari atas mulai dari pusat ke daerah sampai ke tingkat kelurahan. Maksud dari mekanisme perencanaan tersebut adalah supaya usaha – usaha pembangunan akan lebih lancar dan mencapai hasil yang semaksimal mungkin, sehingga diperlukan suatu pengelolaan yang simultan, harmonis dan terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Proses rencana penyusunan dan pengusulan pembangunan yang datang dari bawah (*bottom-up*) yang mekanismenya meliputi langkah-langkah;

1. Musyawarah Pembangunan (Musbang)/musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kelurahan
2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kota/Kabupaten
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Daerah Tingkat I
5. Konsultasi Regional Pembangunan
6. Konsultasi Nasional Pembangunan

Yang diharapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang ini sebenarnya adalah terjadinya pemadu-serasian antara pendekatan *top down* yang dimiliki oleh instansi sektoral dan pendekatan *bottom up* yang diemban oleh instansi daerah berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (musbangkel) dan Temu Karya Pembangunan. Dalam prakteknya forum ini lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana. (Sudriamunawar, 2002: 89-100).

Pada penyelenggaraan musbangkel atau Musrenbang di tingkat kelurahan, masyarakat kelurahan selaku penerima manfaat langsung dari hasil pembangunan seharusnya turut berpartisipasi menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengetahui dampak yang akan ditimbulkan langsung, serta biaya yang harus dibayar.

Prakteknya proses Musrenbang di tingkat kelurahan, yang proses persiapannya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan bermuara pada Musrenbang kelurahan seharusnya berjalan sesuai dengan mekanisme proses Musrenbang yang telah tertuang dalam surat edaran bersama tentang pedoman pelaksanaan forum Musrenbang dan perencanaan partisipatif daerah.

Hadirnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai dua maksud, pertama sebagai lembaga yang dibentuk oleh kelurahan untuk melengkapi prosedur organisasi sesuai arahan dan kebijakan dari "atas", dan kedua sebagai penampung segala bentuk aspirasi kepentingan yang ada di masyarakat

Kota Semarang yang terdiri dari 16 Kecamatan, saat ini mulai digencarkan sistem partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunannya. Hal ini terlihat dengan adanya Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2003, mengenai pedoman pembentukan

lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). LPMK ini dibentuk di setiap kelurahan yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kota Semarang di bidang pembangunan, dan berfungsi sebagai penggerak gotong-royong serta melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif dan terpadu. Selain itu, LPMK juga merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut, aspirasi dan kebutuhan akan dirembug atau dibicarakan pada tingkat kelurahan melalui mekanisme yang ada, tahap selanjutnya akan di sampaikan pada tingkat Musrenbangcam, ada juga usulan program pembangunan yang akan disampaikan oleh instansi sektoral pada tingkat kecamatan.

Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah kotamadia, bahwa dalam proses Rakorbangcam/Musrenbang di tingkat kecamatan dimulai dari musbangkel/Musrenbang tingkat kelurahan, bahwa kecamatan yang terbaik dalam melaksanakan proses Musrenbang adalah kecamatan Genuk dan Tembalang. Hal ini dikarenakan adanya oknum aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut yang mengerti dan memahami serta menerapkan proses Musrenbang tersebut secara baik dan benar, hal ini didukung oleh adanya undangan yang diberikan dari pihak kecamatan terhadap kehadiran aparat pemerintah kota sebagai pemantau Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sedangkan proses Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan yang dikategorikan kurang bagus dan mekanismenya tidak berjalan dengan baik adalah Kecamatan Gajah Mungkur. Tidak berjalannya proses mekanisme Musrenbang dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rapat kerja koordinasi pembangunan kecamatan (Rakorbangcam) atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan Gajah Mungkur, maka diperlukan penelitian yang disusun untuk mengkaji ***"Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajah Mungkur ?"*** dan ***"Variabel apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut ?"***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perencanaan pembangunan dan pemecahan permasalahan pembangunan yang masih cenderung bersifat *Top-Down* seringkali menimbulkan permasalahan baru, sebab perencanaan dan pemecahan masalah tersebut tidak melibatkan masyarakat secara langsung padahal masyarakat inilah yang paling mengerti dan memahami permasalahan yang ada di lingkungannya dan perencanaan pembangunan apa yang tepat bagi mereka sendiri. Oleh karena itu, seharusnya dalam perencanaan, masyarakat dilibatkan sehingga dapat diperoleh data dan informasi serta usulan-usulan program yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut.

Usulan-usulan program dapat berasal dari instansi sektoral yang ada di Kecamatan. Sedangkan dari kelurahan, berasal dari Musbangkel atau Musrenbang tingkat kelurahan yang merupakan musyawarah pembangunan kelurahan dengan menginventarisasi potensi, permasalahan-permasalahan kelurahan serta saran – saran pemecahannya, usulan tersebut berasal dari organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) atau kelompok-kelompok yang berada pada masyarakat.

Pada tahapan inilah keterlibatan masyarakat dalam penyampaian usulan program diikutsertakan hingga pada Musrenbang, agar masyarakat merasa memiliki dalam produk akhir pembangunan dan juga fungsi kawasan yang diemban oleh suatu kawasan tetap terjaga dan terpelihara berdasarkan acuan tata ruang yang dimiliki. Akan tetapi Musrenbang ini tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar akibat adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam Musrenbang. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan dari Kepala Sub Bidang Sosial Budaya Pemerintah Kota Semarang yaitu Bapak Hartoyo, serta Kepala Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan yaitu Ibu Yuli, yang menyatakan bahwa di Kota Semarang ini hanya ada dua kecamatan yang proses Musrenbang-nya berhasil, yaitu Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tembalang, yang diindikasikan dengan keaktifan warga dalam Musrenbang dan selalu melibatkan Pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu pernyataan hipotesa yang dikedepankan untuk menjadi dasar pada penelitian ini adalah ***Bagaimana Tingkatan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur Dalam Musrenbang, dan Faktor Apakah yang Mempengaruhinya?***

Untuk dapat mempertajam dan menjawab hipotesa penelitian tersebut diatas. Diajukan persoalan-persoalan sebagai berikut;

- Bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat yang dilihat dari partisipasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur terhadap proses perencanaan (Musrenbang)?
- Variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur dalam Musrenbang yang ditinjau dari aspek social ekonomi penduduk Kecamatan Gajahmungkur ?
- Bagaimana rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

### **1.3 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui tingkatan partisipasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur dan mengetahui variabel sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

#### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan penelitian ini adalah;

1. Identifikasi karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur
2. Analisis tingkatan partisipasi masyarakat.
3. Analisis variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur
4. Merumuskan temuan studi dan kesimpulan
5. Memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur dalam pembangunan.

#### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berguna ;

1. Gambaran, pelajaran dan pengalaman mengenai tingkatan berkaitan dengan “pemberdayaan kelompok “ (*empowerment*) untuk mengelola sumber-sumber kehidupan yang bertumpu kepada komunitas lokal.

2. Informasi dan masukkan kepada masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak dalam pentingnya partisipasi masyarakat dalam penentuan program pada proses perencanaan program/Musrenbang di tingkat kecamatan.
3. Memberikan masukkan pentingnya pemberdayaan kelompok – kelompok yang ada dimasyarakat.
4. Informasi kepada peneliti yang berminat untuk lebih mendalami masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam produk pembangunan.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi pengerjaan penelitian ini, perlu diberikan ruang lingkup yang tertuang dalam pokok – pokok pikiran sebagai berikut:

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan keberhasilan usulan program pada proses perencanaan program di tingkat Musrenbang cam yang meliputi kajian atas masalah – masalah yang berkaitan dengan pembangunan.

Adapun substansi dalam penelitian ini dibatasi pada :

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

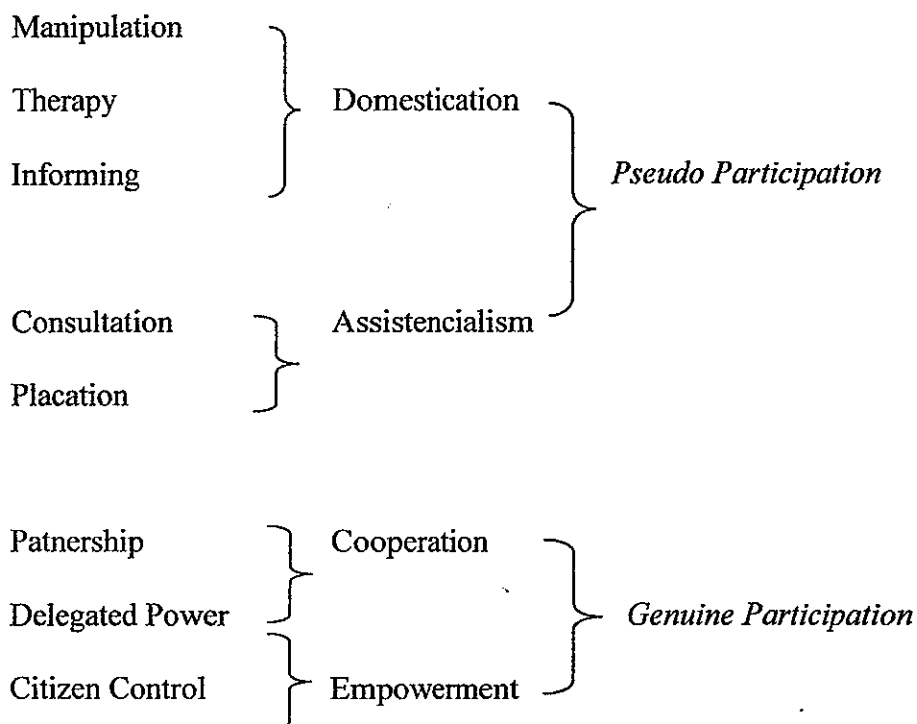
- **Definisi**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai obyek dan subjek pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (Kamus TR, 1998)



- Tingkatan Partisipasi

Deshler dan Shock dalam Selener (2001) mengusulkan sebuah kerangka tentang perbedaan jenis partisipasi, menurut mereka jenis partisipasi dapat dikelompokkan dalam dasar tingkat pengendalian dari partisipasi, dengan menggunakan kiasan tangga meminjam istilah dari Arnstein (1969) dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

*Sumber : Deshler, D and D.sock (1985)*

Arnstein, 1969 (dalam Mitchell, 2000:260) mengklasifikasi partisipasi masyarakat ke dalam 8 tingkatan partisipasi (*ladder of participation*) yang dimuat dalam buku *Classic Reading in Urban Planning* (1995). Kedelapan tangga partisipasi tersebut dari tingkat yang paling rendah hingga tinggi adalah:

1. *Manipulation*

Merupakan keterlibatan dan peran masyarakat tidak ada sama sekali, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah sepenuhnya.

2. *Therapy*

Pemerintah mengatur segala sesuatunya, sehingga masyarakat merupakan obyek program sehingga tidak ada partisipasi.

3. *Informing*

Pada tingkatan ini, masyarakat mulai memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari pemerintah, namun tetap belum berperan serta aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program.

4. *Consultation*

Pada tingkatan ini, mulai terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam suatu program.

5. *Placation*

Pada tingkatan ini masyarakat yang ikut, terlibat, dan berpartisipasi dalam program akan mendapatkan imbalan berupa plakat.

6. *Partnership*

Merupakan tingkatan partisipasi yang ideal, pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam tahapan pelaksanaan program. Pada tingkat ini

memungkinkan setiap individu berpartisipasi penuh dengan menyampaikan ide serta aspirasinya.

#### 7. *Delegated Power*

Pada tingkatan ini, masyarakat mulai diberikan kekuasaan, sehingga kedudukan pemerintah berada di bawah rakyat.

#### 8. *Citizen Control*

Pada tingkatan ini partisipasi ini, masyarakat memegang kekuasaan tertinggi secara penuh dan sebagai akibatnya muncul kegiatan-kegiatan yang menjurus anarki.

### 2. **Proses Pembangunan yang dibatasi pada Musyawarah Rencana Pembangunan.**

- **Definisi**

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1354/M.PPN/03/2004/050/744/SJ, maka Musrenbang ini sangat penting dilakukan dalam rangka sinkronisasi kegiatan-kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Musrenbang diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan/atau dibahas kembali ke tingkat Kecamatan.

- **Masukan**

Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang adalah :

- a) Daftar prioritas masalah.
- b) Peta potensi dan permasalahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll).

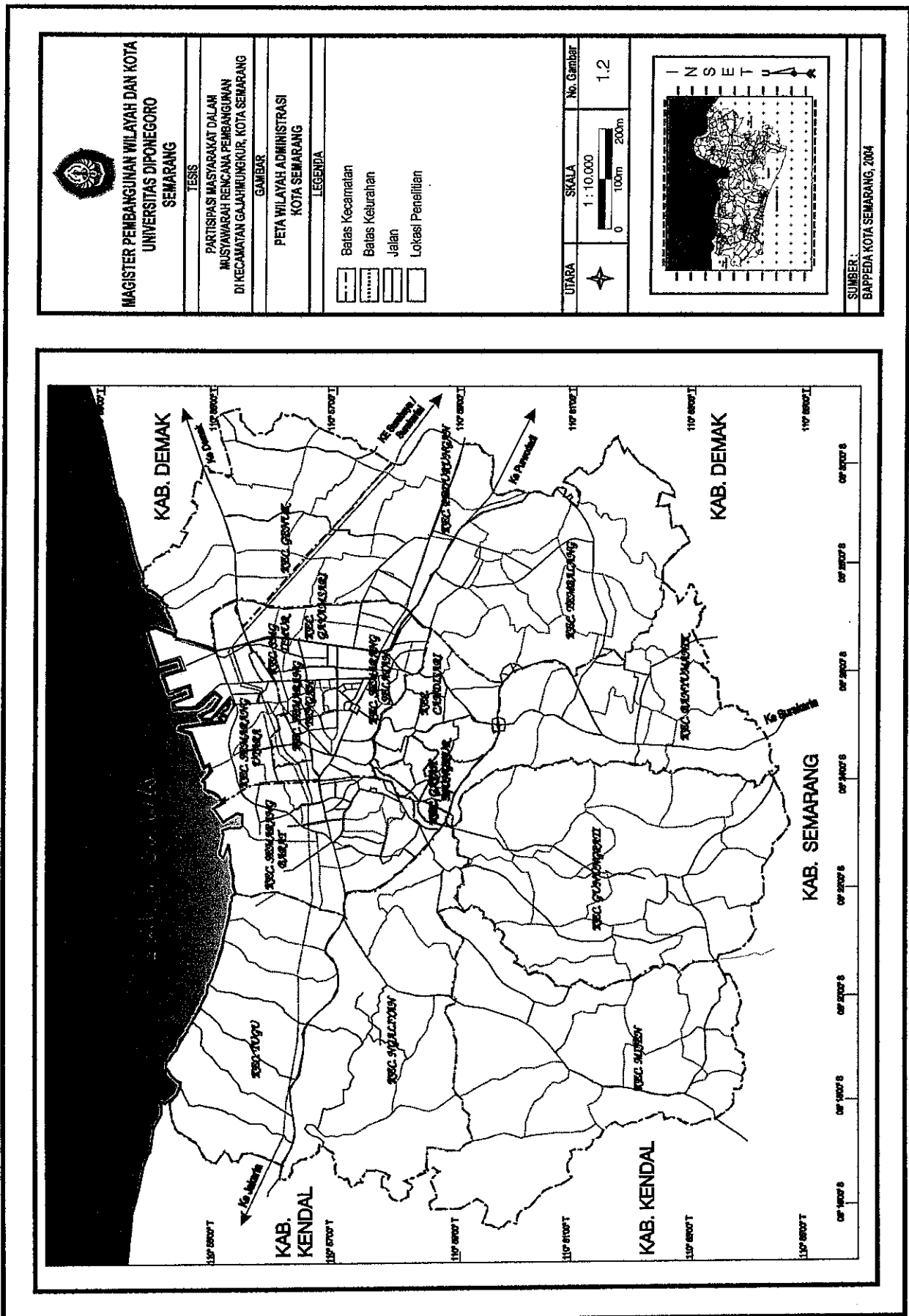
- c) Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
  - d) Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi yang akan dialokasikan kepada Kecamatan yang bersangkutan.
  - e) Informasi dari pemerintah Kabupaten/Kota tentang isu-isu strategis daerah.
  - f) Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi
  - g) Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya.
- Mekanisme
- Mekanisme pelaksanaan Musrenbang terdiri dari tahapan :
- a) Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Camat) dan masyarakat (dipilih oleh warga).
  - b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang
  - c) Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang
  - d) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang
  - e) Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Lingkup makro dalam penelitian ini adalah bagian wilayah kota yaitu kecamatan Gajah Mungkur dengan luas keseluruhan  $\pm 764.987$  Ha dengan jumlah penduduk 58.402 jiwa dimana dalam RTRW Kota Semarang 2000-2010 telah ditetapkan bahwa kecamatan Gajahmungkur merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) II dengan skala kota sebagai fungsi budaya, lingkungan dan sejarah, sedangkan dalam skala regional ditetapkan sebagai fungsi pendidikan, olah raga dan kesehatan.

Lingkup mikro adalah kelurahan – kelurahan dari kecamatan Gajah Mungkur dimana terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, dan mempunyai akses dalam proses perencanaan pembangunan dan terlibat secara langsung dalam mekanisme pengusulan pada proses Musrenbang .

Untuk lebih jelasnya, ruang lingkup spasial yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :



### 1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang sejalan dengan waktu menyebabkan kebutuhan masyarakat di Kota Semarang meningkat pesat sehingga konsekuensinya dibutuhkan pula pembangunan di segala bidang, baik itu bidang fisik, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya.

Pada saat ini, kecenderungan perencanaan pembangunan di Kota Semarang masih bersifat *Top Down*, yaitu masyarakat masih bersifat menunggu terhadap adanya kebijakan pembangunan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan sering terjadinya penyimpangan tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan di kota Semarang. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota, sebab masyarakat adalah merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan itu sendiri.

Paradigma pembangunan yang bersifat *Top Down* ini seharusnya juga melibatkan masyarakat sehingga tujuan dan sasaran pembangunan akan menjadi tepat guna, dan paradigma tersebut diarahkan menjadi sistem terpadu, yaitu *Top Down* dan *Bottom Up*.

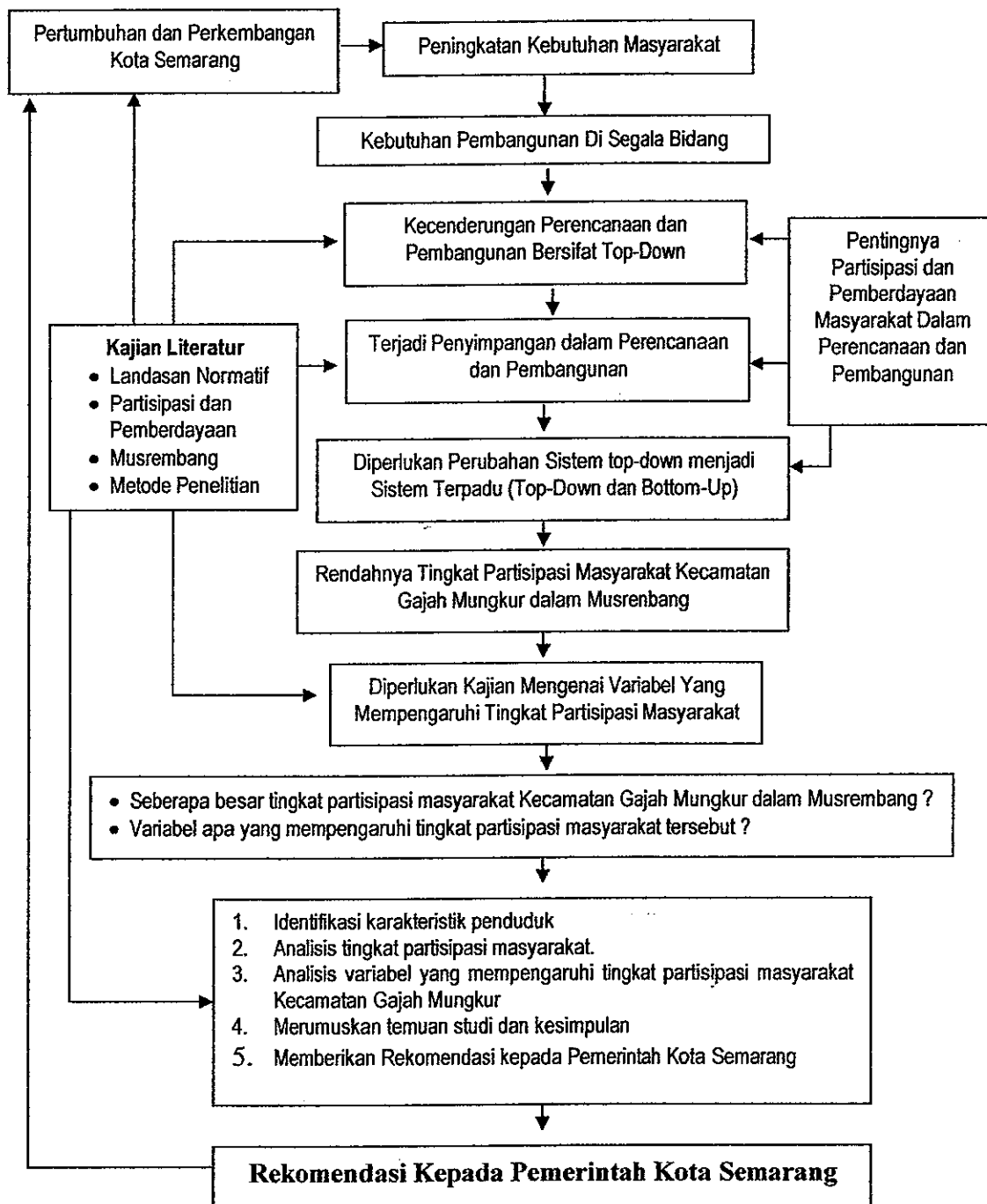
Paradigma ini sudah mulai diterapkan pada beberapa kecamatan di Kota Semarang, dan diantaranya sudah berhasil seperti di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu, sedangkan sebagian besar kecamatan lainnya belum berhasil, atau dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah dengan indikator berupa tingkat keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG). Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan yang masih rendah tingkat partisipasinya. Dalam penelitian ini, wilayah yang dikaji adalah Kecamatan Gajah Mungkur.

Penelitian ini diarahkan untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajah Mungkur, yaitu "Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur dalam Musrenbang ?", dan "variabel apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut?"

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur, mengidentifikasi karakteristik penduduk, dan menganalisis variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan langkah yang dilakukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan temuan studi dan ditarik kesimpulan sehingga variabel yang berpengaruh tersebut dapat ditemukan solusinya dan direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran studi ini dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini :





Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 1.3**  
**KERANGKA PEMIKIRAN STUDI**

## 1.6 Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Studi

### 1.6.1 Pendekatan Studi

Pendekatan studi merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran studi. Studi ini menggunakan beberapa pendekatan yang dapat mendukung dalam mengkaji variabel-variabel yang terkait.

#### a. Pendekatan Deskriptif Eksploratif

Pendekatan Deskriptif eksploratif digunakan untuk menggambarkan dan mengetahui keadaan atau fenomena partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang Kecamatan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Setelah data terkumpul, data kualitatif dianalisis dengan cara naratif atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif dianalisis secara dijumlahkan, diklasifikasi, dan dipersentasekan. Hasil analisis data kuantitatif dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan pemetaan. Pendekatan ini dipakai untuk menjawab pertanyaan:

1. *Bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur ?*
2. *Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur dalam Musrenbang ?*

#### b. Pendekatan Korelasi

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan variable sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur yang paling berpengaruh terhadap Musrenbang Kecamatan berdasarkan partisipasi masyarakat Kecamatan

Gajahmungkur serta menemukan variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Musrenbang tersebut. Selain itu, pendekatan korelasi juga digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur.

### **1.6.2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi:

1. Merumuskan variabel-variabel penentu tingkat partisipasi masyarakat. Tahapan ini diperoleh berdasarkan kajian dari beberapa literatur yang menjadi acuan penelitian.
2. Identifikasi karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi penduduk.
3. Analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Analisis ini diperoleh dari hasil survei primer berupa kuesioner, kemudian variabel-variabel ini dianalisis secara keseluruhan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat.
4. Analisis variabel yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur.
5. Perumusan temuan penelitian dan kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Data adalah merupakan bahasa, mathematical, dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati oleh umum dalam menggambarkan objek yang berupa suatu kenyataan apa adanya (*raw facts*). Agar data tersebut dapat diambil makna atau pengertiannya, maka data tersebut harus dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga data terkonversi menjadi sebuah informasi. Adapun teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam studi ini diuraikan secara lengkap pada beberapa subbab di bawah ini:

#### a. Penentuan Variabel

Istilah “variabel” didefinisikan sebagai objek penelitian yang bervariasi, dan selalu digunakan dalam setiap jenis penelitian. Variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik penduduk, serta identifikasi tingkat partisipasi masyarakat pada Kecamatan Gajahmungkur. Adapun variabel yang digunakan dalam studi ini adalah variabel yang bersifat kualitatif dan variabel kuantitatif.

- Variabel Kualitatif

Variabel kualitatif karakteristik penduduk meliputi ; umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta latar belakang berorganisasi. Sedangkan, variabel kualitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam menetapkan fasilitator dari masyarakat (dipilih oleh warga), menyusun jadual dan agenda Musrenbang, mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang, serta melakukan musyawarah/rembug dusun/RW.

- Variabel Kuantitatif

Variabel kuantitatif dalam studi ini meliputi; jumlah anggota keluarga dan tingkat pendapatan keluarga.

b. Penentuan Jumlah Sampel

Studi ini menggunakan sampel untuk bahan studi dengan alasan bahwa peneliti tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi, dan juga sampel penggunaan ini sangat berguna untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Sebelum dilakukan pengambilan sampel, tentunya jumlah populasi telah diperhitungkan terlebih dahulu. Jumlah populasi yang digunakan adalah jumlah penduduk Kecamatan Gajahmungkur, hal ini dikarenakan Kecamatan Gajahmungkur merupakan wilayah studi mikro dalam studi ini. Adapun penentuan jumlah sampel yang diambil dalam studi ini ditentukan dengan menggunakan formula :

$$n = \frac{NZ^2 p(1-p)}{Nd^2 + Z^2 p(1-p)}$$

N = Jumlah Populasi  
Z = Variabel Normal  
d = Besar toleransi penyimpangan  
p = Proporsi populasi

(Sugiarto, 2001: 60)

Dalam studi ini, jumlah penduduk Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2003 adalah sebesar 40.061 jiwa, dan tingkat kepercayaan yang diambil adalah 95 % sehingga nilai Z yang didapat adalah 1.96, dengan besarnya toleransi penyimpangan 5 %. Oleh karena proporsi populasi dalam studi ini tidak diketahui sebelum dilakukannya analisis, maka rumus ukuran sampel ini menggunakan nilai  $p = 0,5$ , sebab menurut Sugiarto, jumlah sampel ini dapat diperoleh jika nilai  $p = 0,5$ . Maka dari itu, ukuran sampel yang dibutuhkan adalah (Sugiarto, 2001:60):

$$n = \frac{(40.061)(1,96)^2 (0,50)(1 - 0,50)}{(40.061)(0,1)^2 + (1.96)^2 (0,5)(1 - 0,50)}$$

$$n = 96$$

Ukuran sampel yang telah didapatkan tersebut kemudian didistribusikan berdasarkan jumlah penduduk tiap Desa/ Kelurahan yang menjadi wilayah studi. Hal ini didasari oleh penggunaan metode pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*), dimana setiap penduduk memiliki peluang yang sama besar untuk diambil sebagai responden. Alasan digunakannya metode sampel acak sederhana ini adalah bahwa setiap penduduk Kecamatan Gajahmungkur adalah penduduk yang merupakan obyek yang harus berpartisipasi dalam pembangunan mereka semua adalah sebagai objek pembangunan. Adapun proporsi ukuran sampel tiap Desa/ Kelurahan dapat dilihat pada Tabel I.1 di bawah ini.

**TABEL I.1**  
**PENENTUAN JUMLAH SAMPEL**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel
1	2	3	4
1.	Sampangan	5.814	14
2.	Bendan Duwur	1.872	5
3.	Karangrejo	4.545	11
4.	Gajahmungkur	9.547	23
5.	Bendan Ngisor	4.770	11
6.	Petompon	5.468	13
7.	Bendungan	3.221	8
8.	Lempongsari	4.766	11
<b>Jumlah :</b>		<b>40.061</b>	<b>96</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2005

### c. Pengumpulan Data

Dalam studi ini dibutuhkan data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dimana data diperoleh secara langsung dari responden. Untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan observasi lapangan. Data primer yang dibutuhkan dalam studi ini adalah pernyataan dan tindakan dari penduduk Kecamatan Gajahmungkur mengenai karakteristik dan partisipasi mereka dalam Musrenbang. Sedangkan data sekunder adalah merupakan sumber data tertulis yang diperoleh dari arsip atau dokumen dari lembaga/instansi yang terkait. Adapun teknik penggunaan dokumen dapat dilakukan untuk mendapatkan data sekunder atau data tertulis yang berhubungan dengan substansi studi, dengan cara mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini yang berasal dari Instansi Pemerintahan, LSM, atau perpustakaan. Data sekunder ini bersifat sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder yang dibutuhkan berupa data-data pendukung studi yang berasal dari BPS Kota Semarang, Kantor Kecamatan, dan BAPPEDA Kota Semarang.

### d. Kebutuhan Data

Kebutuhan data ini berisi mengenai data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan studi. Adapun data-data yang dibutuhkan ini dapat dilihat pada Tabel

**TABEL I.2**  
**KEBUTUHAN DATA**

No	Kebutuhan Data	Jenis Data & Teknik Survei		Metode Analisis	Sumber	Tahun
		Primer	Sekunder			
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Fisik Alam</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis deskriptif eksploratif</li> <li>Analisis Pembobotan</li> <li>Analisis Tabulasi Silang</li> <li>Analisis Deskriptif Eksploratif</li> </ul>	BPS Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Bappeda Kota Semarang Kantor Kecamatan Gajahmungkur Kantor Kelurahan Gajahmungkur	2003/terbaru
	• Kondisi Geografis		X			
	• Luas Wilayah Kecamatan Gajahmungkur		X			
2	<b>Sosial dan Kependudukan</b>					
	• Jumlah Penduduk		X			
	• Komposisi Penduduk		X			
	• Jenis dan Jumlah Aktivitas Sosial	X				
3	<b>Ekonomi</b>					
	• Jenis Pekerjaan Penduduk	X				
	• Pendapatan Penduduk	X				
	• Kepemilikan Kendaraan	X				
4	<b>Partisipasi Masyarakat</b>					
	• Jumlah kehadiran masyarakat dalam Musrenbang		X			
	• Inisiatif warga untuk hadir dalam Musrenbang	X				
	• Keaktifan warga dalam Musrenbang	X				
	• Keikutsertaan warga dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang	X				
	• Keikutsertaan warga dalam musyawarah/rembug dusun/RW	X				
5	<b>Data pendukung yang bersifat umum</b>					
	• Data monografi Kecamatan Gajahmungkur		X			
	• Peta administrasi Kota Semarang dan Kecamatan Gajahmungkur.					
	• PDRB Kota Semarang		X			
	• RUTRK dan RDTRK Kota Semarang		X			

Sumber : Hasil Analisis 2005

#### e. Pengolahan Data

Setelah menentukan sampel yang dilanjutkan dengan dilakukannya pengumpulan data berdasarkan kebutuhan data di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- Verifikasi, pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar kompilasi data yang telah disusun.



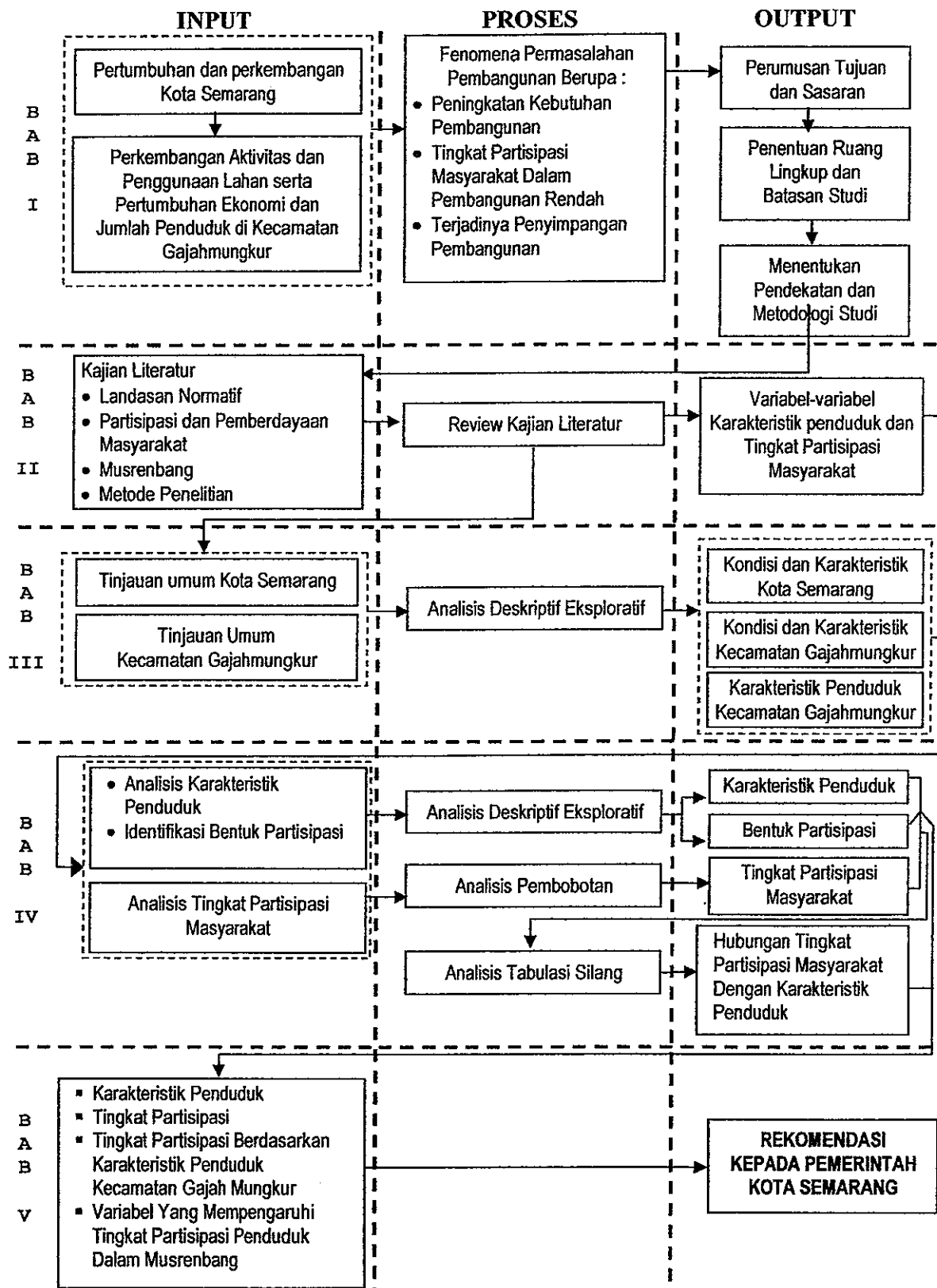
- Klasifikasi, pengelompokan data berdasarkan kepentingan/ tujuan yang ingin dicapai atau berdasarkan kesamaan dalam aspek tertentu.
- Validasi, penilaian apakah data-data yang sudah ada cukup valid dan representatif mewakili kondisi yang diamati.
- *Coding*, pemberian kode pada variabel dan data yang telah terkumpul melalui lembar instrumen
- Tabulasi, proses akhir dalam penyusunan data agar data mudah dibaca, dimengerti dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 1.6.4 Metode Analisis

Dalam subbab metode analisis ini akan dijelaskan mengenai rangkaian metode analisis yang terintegrasi untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berdasarkan karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Beberapa metode analisis ini dapat dilihat pada gambar 1.4 dan dijelaskan pada poin-poin di bawah ini.

##### a. Analisis Deskriptif Eksploratif

Pendekatan Deskriptif eksploratif digunakan untuk menggambarkan dan mengetahui keadaan atau fenomena partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Setelah data terkumpul, data kualitatif dianalisis secara naratif menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif dianalisis secara dijumlahkan, diklasifikasi, dan dipersentasikan. Hasil analisis data kuantitatif dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan pemetaan.



Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA ANALISIS**

Selain itu, analisis ini berguna untuk menunjukkan urutan/tingkatan menurut tanggapan penduduk dan mengkategorikan hasil yang didapat dalam tingkat partisipasi masyarakat.

**TABEL I.3**  
**VARIABEL, DAN TOLOK UKUR TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**DALAM MUSRENBANG DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

No	Variabel	Tolok Ukur
1	Menetapkan fasilitator dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>
2	Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>
3	Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>
4	Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>
5	Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>

*Sumber : Hasil Analisis. 2005*

Untuk lebih jelasnya, alasan mengenai penentuan variabel ini dijelaskan pada poin-poin berikut ini :

- Keikutsertaan masyarakat dalam menetapkan fasilitator masyarakat.

Fasilitator ini sangat penting sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan (Pasal 1 Perda Kota Semarang Nomor 9 tahun 2003). Oleh karena itu, kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam menetapkan fasilitator ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Maka dari itu, keikutsertaan masyarakat dikategorikan menjadi 3 yaitu hadir dan aktif, hadir dan tidak aktif, serta tidak hadir.

- Keikutsertaan masyarakat dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1354/M.PPN/03/2004/050/744/SJ, maka Musrenbang ini sangat penting dilakukan dalam rangka sinkronisasi kegiatan-kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan/atau dibahas kembali ke tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Maka dari itu, keikutsertaan masyarakat dikategorikan menjadi 3 yaitu hadir dan aktif, hadir dan tidak aktif, serta tidak hadir.

- Mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Musrenbang ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Proses Musrenbang ini memerlukan bahan dan materi yang akan diangkat, Oleh karena itu, kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam mempersiapkan bahan dan materi sangat diperlukan dalam proses Musrenbang. Maka dari itu, keikutsertaan masyarakat dikategorikan menjadi 3 yaitu hadir dan aktif, hadir dan tidak aktif, serta tidak hadir.

- Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Musrenbang ini sangat diperlukan, dan Musrenbang ini memerlukan jadwal, agenda, dan tempat. Oleh karena itu, diperlukan pengumuman secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang. Maka dari itu, keikutsertaan masyarakat dikategorikan menjadi 3 yaitu hadir dan aktif, hadir dan tidak aktif, serta tidak hadir.

- Melakukan musyawarah/ rembug dusun/ RW

Setelah dilakukan pengumuman mengenai jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan musyawarah/rembug dusun/RW untuk menggali beberapa informasi dari warga mengenai potensi maupun permasalahan di lingkungannya. Maka dari itu, keikutsertaan masyarakat dikategorikan menjadi 3 yaitu hadir dan aktif, hadir dan tidak aktif, serta tidak hadir.

b. Analisis Tabulasi Silang

Setelah didapatkan tingkatan partisipasi masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap tingkatan partisipasi masyarakat tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis tabulasi silang (*cross tabulation*). Model analisis tabulasi silang ini digunakan untuk menghitung kasus yang memiliki kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih. Dalam studi ini nilai tersebut berasal dari variabel karakteristik sosial ekonomi penduduk Kecamatan Gajahmungkur dan variabel tingkat partisipasi masyarakat pada Kecamatan Gajahmungkur.

Dalam studi ini, analisis tabulasi silang digunakan dalam bentuk tabel dua dimensi. Untuk memperjelas bentuk tabel BK (baris-kolom) dua dimensi ini dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :

		Tingkat Partisipasi			Jumlah
		1	2	3	
Karakteristik Penduduk	1	0 <sub>1</sub> E <sub>11</sub>	0 <sub>2</sub> E <sub>12</sub>	0 <sub>3</sub> E <sub>13</sub>	
	2	0 <sub>4</sub> E <sub>21</sub>	0 <sub>5</sub> E <sub>22</sub>	0 <sub>6</sub> E <sub>23</sub>	
	3	0 <sub>7</sub> E <sub>31</sub>	0 <sub>8</sub> E <sub>32</sub>	0 <sub>9</sub> E <sub>33</sub>	
	4	0 <sub>10</sub> E <sub>41</sub>	0 <sub>11</sub> E <sub>42</sub>	0 <sub>12</sub> E <sub>43</sub>	
Jumlah					

Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 1.5**  
**TABEL KONTINGENSI B X K**  
**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG BERDASARKAN**  
**KARAKTERISTIK PENDUDUK KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**

Variabel-variabel yang akan diperhitungkan dalam metode ini adalah:

1. Variabel karakteristik penduduk meliputi: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, serta latar belakang berorganisasi.
2. Variabel tingkat partisipasi meliputi: keikutsertaan masyarakat dalam menetapkan fasilitator dari masyarakat (dipilih oleh warga), menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, serta melakukan musyawarah/rembug dusun/RW.
3. Setelah dilakukan pemilihan variabel dan pengolahan data, maka selanjutnya dihitung harga-harga beserta uji statistiknya. Harga statistik yang digunakan yaitu banyaknya gejala yang diharapkan terjadi ( $E_{bk}$ ). Adapun formula untuk menghitung ( $E_{bk}$ ) adalah :

$$E_{bk} = (n_{bk} \times n_{kb}) / n$$

Penggunaan nilai signifikan (*significant level*) adalah 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Tingkat signifikasi 0,05 ini dipandang cukup tinggi untuk sebuah penelitian sosial, dengan asumsi tingkat kesalahan adalah sebesar 5%.

Untuk menguji apakah ada hubungan antar variabel tersebut, maka digunakan *Chi-Square* statistik uji Pearson. Hasil perhitungan akan dibandingkan dengan harga titik kritis pada tabel distribusi *Chi-Square*, selain itu juga diperlukan derajat kebebasan (*degrees of freedom = df*). Apabila *Chi-Square* uji Pearson lebih besar daripada harga titik kritis pada tabel *Chi-Square*, maka hipotesa yang menyatakan kedua variabel tidak berhubungan ditolak, berarti terdapat hubungan antar variabel yang diuji. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka tidak ada hubungan antara variabel yang diuji. Untuk mengukur sifat atau tingkat hubungan antara dua variabel, digunakan koefisien kontingensi yang didasarkan perhitungan *Chi-Square* dengan nilai 0 sampai 1. Adapun pasangan hipotesis yang akan diuji berdasarkan data dalam tabel kontingensi di atas adalah:

**Ho = Variabel Tingkat Partisipasi dan Variabel Karakteristik Penduduk Tidak Berhubungan**

**Hi = Variabel Tingkat Partisipasi dan Variabel Karakteristik Penduduk Berhubungan**

Formula yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dapat dilihat di bawah ini (Pasaribu, 1983:122) :

$$X^2 = \sum_{E=1}^I \sum_{J=1}^J \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Hipotesa Ho ditolak jika :  $X^2 > X^2_t$ , dan

Hipotesa Hi diterima jika :  $X^2 > X^2_t$

Hasil dari analisis tingkat partisipasi ini adalah berupa variabel karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang di

Kecamatan Gajahmungkur. Hasil ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pengembangan sistem pembangunan kota di Kota Semarang.

### **1.7 Sistematika Penulisan Penelitian**

Secara garis besar sistematika penulisan tesis penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Gajahmungkur” ini, terdiri dari 5 (Lima) Bab Pembahasan, yaitu ;

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah studi, kerangka pemikiran studi, kerangka analisis, serta sistematika penyusunan tesis. Pada bab ini dijelaskan juga mengenai metodologi pendekatan studi serta analisis yang digunakan dalam studi, meliputi pendekatan deskriptif eksploratif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan korelasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembobotan dan analisis tabulasi silang.

## **BAB II KAJIAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT**

Bab II merupakan studi literatur yang terkait dengan judul penelitian, yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam proses penelitian lebih lanjut. Bab ini diawali dengan yang pertama definisi tentang teori partisipasi masyarakat, yang meliputi pengertian partisipasi, arti penting partisipasi, jenis partisipasi, strategi partisipasi warga, lingkup partisipasi masyarakat, model logika yang mendasari strategi partisipasi, pengembangan model praktis lingkup partisipasi masyarakat, bagian kedua meliputi;



pengertian pemberdayaan, karakteristik pemberdayaan, tahap – tahapan pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, peran warga dalam perencanaan, bagian ketiga program strategis dan konsep perencanaan strategis meliputi; definisi program strategis, konsep perencanaan strategis, konsep perencanaan struktur strategis, konsep perencanaan strategis keruangan mengacu pada perencanaan strategis perusahaan, keterkaitan antara perencanaan strategis dan partisipasi, variabel penelitian dan rangkuman teori.

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Bab III berisi permasalahan umum pada wilayah penelitian yang meliputi lingkup makro kota semarang, lingkup mikro kecamatan Gajah Mungkur, identifikasi potensi kegiatan di kecamatan Gajah Mungkur, keberagaman kepentingan di kecamatan Gajah Mungkur serta identifikasi kelembagaan di kecamatan Gajah Mungkur

### **BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Bab ini menjelaskan mengenai analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik penduduk Kecamatan gajahmungkur. Analisis yang digunakan meliputi analisis karakteristik penduduk, analisis tingkat partisipasi masyarakat, dan analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik pergerakan penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Analisis karakteristik penduduk dilakukan dengan menggunakan metode desriptif eksploratif, dimana didalamnya berisi mengenai uraian mengenai karakteristik sosial ekonomi penduduk yang meliputi jenis kelamin, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendapatan. Kemudian analisis tingkat partisipasi masyarakat dilakukan dengan metode pembobotan,

dimana didalamnya terdapat pemberian bobot terhadap variabel Musrenbang sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Selanjutnya adalah melakukan analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berdasarkan karakteristik penduduk dengan menggunakan metode analisis tabulasi silang, dimana didalamnya terdapat hipotesis mengenai ada tidaknya hubungan serta ada tidaknya perbedaan pada setiap variabel karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini kesimpulan dari hasil studi serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Semarang dan penduduk Kecamatan Gajahmungkur dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN**

#### **2.1 KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT**

##### **2.1.1 Pengertian Partisipasi**

Terdapat beberapa pengertian dasar mengenai partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang. (Kamus Tata Ruang, 1998).
- Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai obyek dan subjek pembangunan, keterlibatan dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya. (Kamus TR, 1998).
- Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1986: dikutip dari Widyonindito).
- Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan – tingkatan yang berbeda, yaitu:

- a) Dalam proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan – tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b) Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela
- c) Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek

Definisi ini menurut Slamet (1996), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan dilihat semata dari aspek pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan material dan produksi saja, tetapi lebih melihat kepada perubahan dan pemerataan produksi dalam sifat hubungan sosial, yang titik beratnya pada perubahan dasar secara kualitatif dan distribusi di dalam struktur masyarakat melalui peniadaan diskriminasi dan penindasan struktural, penciptaan dan jaminan akan adanya kesempatan dan pembagian yang lebih merata atas hasil pertumbuhan ekonomi dikalng masyarakat, Sedangkan alasan pembenaran bagi pentingnya partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah;

- (a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- (b) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting menyangkut masyarakat;
- (c) Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

- (d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- (e) Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- (f) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri;
- (g) Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek – proyek akan gagal;
- (h) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

### **2.1.2 Arti Penting Partisipasi**

Pemberian pengertian tentang arti penting partisipasi diberikan sebagai berikut;

- Pentingnya partisipasi anggota juga berkaitan dengan loyalitas anggotanya, semakin tinggi anggota berpartisipasi semakin tinggi kecenderungan mereka menunjukkan loyalitas dan pada gilirannya, loyalitas akan menghasilkan kohesi kelompok ini akan mengakibatkan para anggota tetap setia tinggal sebagai anggota organisasi. Anggota-anggota suatu asosiasi yang memandang asosiasi itu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan-keuntungan materiil atau keuntungan pribadi yang lain biasanya kurang loyal

terhadap assosiasinya dibandingkan dengan anggota yang memandang suatu asosiasi sebagai wadah yang mencerminkan aspirasi idealismenya.

- Partisipasi juga meningkatkan perasaan ikut memiliki (sense of belonging) yang menghasilkan suatu identitas dengan asosiasi itu.
- Partisipasi anggota mempunyai arti penting bagi pengembangan organisasi/assosiasi. Setiap organisasi/asosiasi mempunyai titik berat tujuan sendiri-sendiri. Dengan aktifnya anggota di dalam suatu organisasi maka akan terjadi pertukaran pendapat, komunikasi yang lebih erat.
- Efektivitas lembaga – lembaga lokal dalam memanfaatkan bantuan – bantuan pemerintah baik yang berupa uang dan keahlian yang dialokasikan dalam perencanaan nasional kedalam program-program yang terumuskan dengan pasti serta sumber-sumber yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri untuk mencapai hasil yang diharapkan, amat tergantung pada derajat kemampuan mengorganisir partisipasi masyarakat melalui lembaga- lembaga lokal.
- Hambatan – hambatan Partisipasi rakyat, kendatipun peranan partisipasi dalam pembangunan sangat jelas, namun terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya.
- Kurangnya perhatian yang murni terhadap persamaan sosial.
- Kekhawatiran terhadap aksi bersama.
- Kurangnya akses kesempatan rakyat.
- Pendekatan pembangunan yang terpecah-pecah.

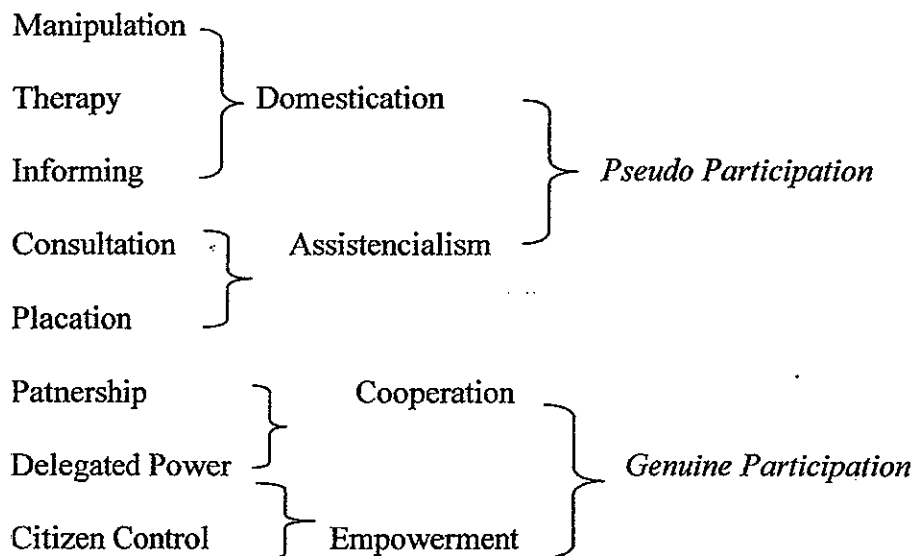
Sedangkan kondisi yang mendukung partisipasi rakyat adalah:

- Strategi pembangunan diarahkan pada bagian rakyat miskin.

- Pembentukan kelompok di luar koperasi (kerja sama) yang berbasis peningkatan ekonomi.
- NGO-NGO (*Non Government Organization*) memainkan peran yang bersifat mendukung.

### 2.1.3 Jenis Partisipasi

Deshler dan Shock dalam Selener (2001) mengusulkan sebuah kerangka tentang perbedaan jenis partisipasi, menurut mereka jenis partisipasi dapat dikelompokkan dalam dasar tingkat pengendalian dari partisipasi, dengan menggunakan kiasan tangga meminjam istilah dari Arnstein (1969) dapat digambarkan sebagai berikut:



Source Deshler, D and D.sock (1985)

**GAMBAR 2.1**  
**TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

- Partisipasi sebagai pelayanan (*Domestication*), partisipasi model ini, kekuasaan dan pengendalian berada pada perencana, administrasi elite lokal ahli dan profesional. Partisipasi dapat tercapai dengan menggunakan teknik partisipasi semu, yaitu memanipulasi masyarakat untuk melakukan apa yang orang luar anggap atau merasa penting untuk dilakukan bagi keuntungan kepentingan manfaat anggota, padahal mereka sendiri tidak dilibatkan.
- Partisipasi sebagai Pertolongan (*Assistencialism*), partisipasi model ini dasar pemikiran yang rasional sebagai perbantuan atau pertolongan, kekuasaan dan pengendalian berada pada agent luar atau penguasa. Anggota berpartisipasi dalam kelompok menerima informasi, dan membicarakan dan membantu pihak penguasa. Peneliti berfokus hanya membantu kelompok dalam menyelesaikan masalah penyakit sosial. Anggota merasa sebagai objek yang pasif, tidak mampu berbicara aktif dalam bagian proses partisipasi. Mereka diberitahu aktifitas kegiatan tapi tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau pengendalian yang menguntungkan.
- Partisipasi sebagai Kerjasama (*Cooperation*), partisipasi model ini melibatkan orang bekerja sama dengan orang luar untuk mengimplementasikan, dengan penekanan bahwa semua anggota diuntungkan, keputusan diambil melalui musyawarah antara orang dalam dan orang luar. Anggota juga aktif dilibatkan dalam keseluruhan program. Kekuasaan dan Pengendalian dibagi dalam proyek, idealnya termasuk pendekatan dari bawah keatas.
- Partisipasi sebagai pemberdayaan (*Empowerment*), adalah model pendekatan partisipasi yang mana masyarakat secara penuh dilibatkan atau diberdayakan



meliputi “pemberian kekuasaan” dalam pengendalian program atau kelembagaan, termasuk pengambilan keputusan dan aktifitas administrasi. Partisipasi terjadi pada tingkat politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pemberdayaan dicapai melalui konsistensi, demokrasi, solidaritas dan kepemimpinan.

#### **2.1.4 Strategi Partisipasi Warga**

Strategi partisipasi warga dimaksud untuk mendapat gambaran partisipasi warga dalam dinamika kelompok untuk mencapai tujuan kelompok tersebut. Menurut (Burke, 1978). Terdapat 6 (enam) strategi dalam pengimplementasian sasaran yang dicapai oleh kelompok, tersebut antara lain;

##### **o *Strategi Terapi Pendidikan***

Fokus perhatian pada anggapan bahwa dibutuhkan perbaikan terhadap para partisipan secara individu. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dalam urusan kemasyarakatan. Pada konteks ini kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk pelatihan kewarganegaraan, dimana para warga yang bekerja sama memecahkan berbagai persoalan kelompok, bukan saja belajar bagaimana demokrasi bekerja tetapi belajar pula menilai dan menghargai kerja sama sebagai suatu metoda untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat memperkuat pemerintah lokal, mendorong pembangunan kelompok dan menciptakan kekeluargaan didalam kelompok.

Kelemahan strategi ini adalah yang pertama sangat sulitnya mengakomodasikan srategi ini dengan tuntutan organisasi. Untuk memberikan perhatian utama pada kebutuhan hidup salah satu kelas suatu anggota organisasi

merupakan tindakan yang dapat mengganggu fungsi organisasi tersebut. Kedua para partisipan yang terdiri dari para warga, dengan sendirinya akan berorientasi pada pelaksanaan tugas. Mereka secara mutlak akan menolak metoda yang fokus pada kebutuhan pendidikan mereka.

#### ○ *Strategi Perubahan Perilaku*

Tujuan strategi ini adalah untuk mendorong terjadinya perubahan pada sistem atau sub sistem melalui perubahan perilaku, baik anggota sistem maupun perwakilan berpengaruh dari sistem tersebut. Kelompok dipandang sebagai sumber berpengaruh atas anggota-anggotanya. Oleh karena itu, dengan memusatkan perhatian pada standart kelompok, seperti cara kepemimpinannya atau atmosfer emosionalnya, maka perubahan perilaku anggota individunya dianggap memungkinkan. Kelompok itu sendiri menjadi sasaran perubahan walaupun tujuannya adalah untuk mengubah perilaku anggota individunya. Penekanan inilah yang membedakan strategi ini dengan strategi terapi pendidikan. Terdapat dua dasar pemikiran pada strategi ini, yang pertama akan lebih mudah mengubah perilaku seorang individu bila individu itu merupakan anggota suatu kelompok daripada berusaha mengubah individu tersebut secara terpisah-pisah. Kedua, individu dan kelompok akan menolak keputusan yang dipaksakan kepada mereka.

#### ○ *Strategi Penambahan Staff*

Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa perencanaan merupakan keahlian yang terbatas. Dia dapat memiliki pengetahuan yang bersifat konsep dan analitis tetapi dia bukan ahli dalam semua permasalahan substantif yang melibatkan dirinya.

Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi kebijaksanaan, kemampuan, waktu senggang, serta pengetahuan keahlian yang dimiliki oleh para warga sukarela. Warga dipandang sebagai anggota staf yang sedang menjalankan peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan guna mencapai sasaran dari suatu tugas perencanaan serta misi dari lembaga perencana. Warga dapat memberikan kerangka kerja dan latar belakang dimana permasalahan dan prioritas dapat teridentifikasi.

#### ○ *Kooptasi*

Tujuannya warga dilibatkan dalam organisasi guna mencegah terjadinya gangguan yang telah diketahui sebelumnya, warga dipandang sebagai unsur potensial yang dapat mengganggu atau membuat frustrasi, dimana kerjasama atau ijinnya memang dibutuhkan.

Keuntungan mereka dilibatkan pada tingkat pembuatan kebijakan karena pengaruh yang mereka miliki sangat penting untuk keberlangsungan kebijakan organisasi yang telah ada. Kooptasi hanya dapat menggambarkan suatu teknik pengangkatan dimana pertukaran yang terjadi memberikan keuntungan secara eksklusif kepada organisasi itu.

#### ○ *Strategi Community Power*

Power didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan kemauannya, bahkan bila terjadi berbagai pertentangan dari pihak yang lain. Terdapat 2 (dua) strategi dalam *Community Power*, pertama dengan mengangkat pihak yang berpengaruh dapat memberikan kekuatan dan pengaruh kepada orang. Kedua pihak yang berpengaruh akan berpartisipasi pada organisasi yang dapat

mempertahankan atau meningkatkan status mereka sebagai pihak yang berpengaruh.

#### ○ *Strategi Advokasi*

Tingkat keefektifan strategi ini terlihat semakin terbatas dengan berjalannya waktu. Usaha untuk mempertahankan ketertarikan warga telah menjadi kesulitan yang utama. Organisasi hanya memiliki sasaran, maksud ideal untuk mempertahankan ketertarikan pada sasaran yang idealis dalam jangka waktu yang panjang. Secara pribadi, komitmen yang dibutuhkan secara emosional sangat melelahkan. Seringkali pemimpin organisasi terpaksa bergantung kepada desakan atau pembuatan krisis agar ketertarikan tercipta kembali. Jumlah anggota akan menurun atau seringkali organisasi berubah, mereka cenderung kurang kurang mengandalkan taktik konflik dan lebih mengandalkan kerja sama.

Dari uraian identifikasi enam strategi dari partisipasi warga. Ketepatan dan keefektifan strategi-strategi ini akan sangat bergantung pada dua kondisi. Pertama Kondisi organisasi, yaitu misi, bantuan, serta sumber daya suatu organisasi. Tidak semua strategi tepat untuk semua organisasi. Strategi yang berorientasi pada konflik, yang bergantung pada proses masyarakat sangat tidak tepat bagi perencanaan umum. Strategi yang tepat bagi perencanaan umum dan sebagian besar lembaga perencanaan adalah **strategi perubahan perilaku** dan **penambahan staf**. Kedua yang menentukan keefektifan dan ketepatan suatu strategi partisipasi warga adalah peran spesifik yang diberikan kepada warga di dalam organisasi perencanaan. Peran yang tepat untuk strategi penambahan staf adalah sebagai **penasihat** atau **pengambilan keputusan secara bersama**.

Ditekankan disini bahwa strategi partisipasi warga akan menentukan struktur peran warga di dalam organisasi perencanaan.

### 2.1.5 Lingkup Partisipasi Masyarakat

Karakteristik proyek pembangunan masyarakat, proyek pemberdayaan masyarakat dan proyek-proyek pengembangan perkotaan dapat dirangkum sebagai berikut:

**TABEL II.1**  
**KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN**

Karakteristik	Pembangunan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Terbuka
Peran Pemerintah	Terbuka	Tertutup/dibatasi	Terbuka
Sifat Proses Pengambilan Keputusan	Sosial/Ekonomi Program-Program berskala kecil yang keluaran sudah relatif jelas	Politis/Ekonomis Program dengan sasaran tertentu dan keluaran sudah relatif jelas	Ekonomi/teknis/social Kebijakan melibatkan banyak komponen serta memiliki tujuan yang lebih beragam
Dinamika Masyarakat	Fokus, didasarkan pada pemilihan proyek	Fokus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Tersebar dan heterogen
Tujuan Utama Proses Partisipasi Masyarakat	Terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan pada lingkup internal masyarakat	Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan hasil negosiasi antara pihak pemerintah dan masyarakat	Sistem manajemen terpadu Memungkinkan terjadinya interaksi secara luas dengan beragam komponen
Keterlibatan Pihak Ketiga	Fokus pada Pelatihan	Fokus pada Pendidikan	Kegiatan pelatihan dan pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi

Sumber : Lund, 1990:178-179 dalam Mikelsen (2003)

- Dalam perkembangannya, paradigma proses pengambilan keputusan mengalami pergeseran, dari model pengambilan keputusan yang berbasis pada permasalahan menjadi model pengambilan keputusan yang berbasis pada sistem. Perubahan paradigma ini menyebabkan peran masing-masing stakeholder yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan juga menjadi berubah.

- Analisis dan proses pengambilan keputusan dapat dieksplorasi dengan menggunakan dua paradigma, yaitu paradigma reduksi yang berbasis pada keilmuan serta paradigma yang berbasis pada sistem pemikiran yang juga dikenal sebagai konsep kompleksitas yang diorganisasi.

### 2.1.6 Model Logika Yang Mendasari Strategi Partisipasi

Partisipasi dan efisiensi, kedua interpretasi ini merupakan satu kesatuan yang oleh Lunnd dalam Mikkelsen (2003) yang membandingkan antara efisiensi dan pemberdayaan sebagai berikut;

**TABEL II.2**  
**EFISIENSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

ASPEK	EFISIENSI	PEMBERDAYAAN
Strategi	Pembangunan melalui kemitraan 'top down' dengan masyarakat. (jangkauan kebawah yang inklusif)	Pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat. (Jangkauan ke atas yang integratif)
Asumsi Normatif	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti ditentukan oleh negara	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan.
Asumsi Deduktif	Ini mensyaratkan sebelumnya partisipasi dalam program pembangunan. Karena itu mereka harus dibuat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi	Ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka.
Assumsi Teoritis Sebab- Akibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik diantara kelompok-kelompok sosial dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat merupakan alat efektif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam) dengan tujuan melaksanakan program pembangunan tertentu.</li> <li>4. Kurangnya partisipasi merupakan suatu ekspresi dari ketidakmampuan untuk berpartisipasi: kurangnya dana, pendidikan, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok-kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin.</li> <li>2. Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat.</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.</li> </ol>

	<p>sumber-sumber lain, serta tingkat organisasi rendah.</p> <p>5. Atau bisa juga berarti rancangan program kurang disesuaikan pada kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang menyimpang, atau teknologi yang tidak tepat.(hambatan operasional dalam berpartisipasi). Jadi hal ini merujuk pada perbaikan pendidikan, teknik, administrasi dan keuangan.</p>	<p>4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti penolakan (secara internal di kalangan anggota masyarakat itu dan secara eksternal terhadap pemerintah, atau pelaksana proyek).</p> <p>5. Atau hal itu menunjukkan adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi.(Hambatan struktur untuk berpartisipasi). Jadi ini merupakan konflik sosial yang harus diatasi melalui musyawarah mufakat, kompromi atas kebijakan yang bertentangan itu atau menghilangkan struktur yang tidak memungkinkan partisipasi melalui reformasi politik.</p>
--	--	--

Sumber : Lund, S1990; 178-179 dalam Mikelsen(2003)

### 2.1.7 Pengembangan Model Praktis Lingkup Partisipasi Masyarakat

Pengembangan model praktis lingkup partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh struktur partisipasi masyarakat, pola kebutuhan dalam proses implementasi kebijakan, dan aktor yang terlibat. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut;

- Terdapat sebelas elemen yang mempunyai pengaruh penting dalam struktur partisipasi masyarakat, yaitu obyektivitas dari aktivitas tersebut, intensitas partisipasi, instrumen partisipasi, kondisi lingkungan yang berpengaruh dalam proses partisipasi, identifikasi aktor utama, hal utama yang dibahas dalam kegiatan partisipasi serta distribusi kewenangan antar pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, proses implementasi kerangka kerja partisipasi, perbedaan pola kebutuhan antar kelompok serta pola kebutuhan diantara aktor-aktor yang saling berbeda.

- Pola kebutuhan dalam proses implementasi suatu kebijakan dapat dibedakan menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan proyek, kebutuhan pemerintah, serta kebutuhan aktor-aktor lainnya.
- Aktor utama dalam proses implementasi kebijakan adalah politisi dan staf terkait pada setiap level pemerintahan, kelompok oposisi baik pada lingkup nasional maupun regional, organisasi masyarakat lokal dan kelompok kepentingan lainnya, organisasi non pemerintah, institusi finansial dan lembaga pembiayaan pembangunan lainnya, para professional yang bersifat teknis serta kepentingan komersial lainnya.

Terdapat dua permasalahan dasar tentang keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, yaitu bentuk keterwakilan masyarakat serta intensitas keterlibatan masyarakat, idealnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan sudah dimulai sejak kebijakan tertentu tersebut dirumuskan. Disamping itu, juga diperhatikan bahwa legitimasi keterlibatan masyarakat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan personal atau komponen kelompok yang dianggap mewakili keberadaan kelompok tersebut secara keseluruhan.

Efektivitas partisipasi masyarakat membutuhkan adanya intervensi dari lingkungan eksternal serta koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Proses intervensi dibutuhkan ketika terbentuk kondisi yang mengharuskan adanya tindakan mediasi untuk menjembatani kepentingan antar stakeholder serta ketika dibutuhkan salah satu atau sebagian stakeholder membutuhkan tindakan pelatihan/pendidikan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tersebut terhadap permasalahan yang sedang ditangani.



Sementara proses koordinasi diantara stakeholder dibutuhkan karena terdapat kesadaran bahwa masing-masing stakeholder mempunyai pola kepentingan, latar belakang ketrampilan dan latar belakang sosial yang saling berbeda. Melalui proses koordinasi tersebut, diharapkan perbedaan-perbedaan demikian akan dapat diminimalkan sehingga upaya pencapaian *konsesus* dalam proses pembuatan keputusan dapat terwujud.

- Tingkat keberhasilan proses partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas akan sangat tergantung kepada pemahaman terhadap interaksi antara aktivitas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses aktivitas tersebut.
- Terdapat dua indikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses partisipasi masyarakat, yaitu derajat prioritas kebutuhan yang berhasil disepakati serta intensitas masyarakat yang terlibat dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut.

## **2.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan, berangkat dari pengertian itu maka pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh kemampuan/daya, atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Pengertian proses disini diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil secara sistematis bertahap mengubah masyarakat yang belum berdaya menjadi berdaya. Pengertian

Pemberdayaan (*empowerment*) di negara eropa berbeda dengan pemberian pemberdayaan di Indonesia, kalau di eropa lebih kepada “pemberian kekuasaan” sedangkan di Indonesia lebih kepada memberi “energi “ supaya mampu bergerak secara mandiri.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini pemberdayaan bukan saja pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Apa yang diharapkan dari pemberdayaan dapat mewujudkan komunitas yang baik, masyarakat ideal, sebagaimana dikemukakan oleh Montagu dan Matson dalam Suprijatna, sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat adalah;

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.
2. Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab.
3. Memiliki vialibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri.
4. Distribusi kekuasaan merata sihingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya.
5. Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
6. Komunitas memberi makna kepada anggota.

7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat.
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.
9. Adanya konflik dan manajemen konflik

Pada awalnya upaya pemberdayaan masyarakat pasti dihadapkan pada kondisi dari masyarakat yang dalam posisi lemah atau tidak berdaya, mungkin dapat terjadi pada masyarakat secara keseluruhan pada suatu wilayah tertentu sama sekali belum berdaya, namun pada perkembangannya lebih secara tegas diarahkan pada **target group** yang akan diarahkan. Dilihat dari heterogenitas dan perbedaan profesi, pendapatan, umur dan kategorial yang akan diberdayakan maka target group merupakan alternatif pilihan dari penelitian yang dianggap tepat dalam pemberdayaan. Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut;

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas
3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui.
4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial.

### **2.2.2 Karakteristik Pemberdayaan**

Syarat – syarat yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan tahap – tahapan pemberdayaan masyarakat dikatakan oleh Freire dalam Abbott (1996) sebagai berikut; untuk mengidentifikasi bahwa, terdapat tiga prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses pemberdayaan, yaitu kerjasama, organisasi, sintesa budaya serta kesamaan pandangan untuk menggerakkan perubahan.

Sedangkan untuk tahap pemberdayaan masyarakat meliputi 3 tahapan, yaitu; tahap penyadaran masyarakat, tahap peralihan dari penyadaran ke pemberdayaan, serta tahap pemberdayaan politis dalam pelaksanaan suatu program pembangunan.

Hal yang mendasar tentang pemberdayaan, yang perlu dijadikan “rambu–rambu” adalah sikap pandangan terhadap pemberdayaan antara lain; apa perlu adanya pemberdayaan, untuk apa proses pemberdayaan, kriteria yang dipakai dalam menilai pemberdayaan itu baik atau tidak.

### **2.2.3 Tahap – Tahap Pemberdayaan**

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai pada target masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi, dilihat dari konteks ini maka pemberdayaan melalui suatu massa proses pembelajaran hingga mencapai status mandiri. Dalam rangka proses pembelajaran maka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap.

Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut menurut Abbott (1996) meliputi;

1. Tahap penyadaran masyarakat, terjadi pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Peralihan dari penyadaran ke pemberdayaan (transformasi), kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap Pemberdayaan Politis dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Adanya “kebijakan pemerintah” yang merespon dari keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap pemberdayaan sasaran utama adalah masyarakat miskin, atau masyarakat lain yang sangat ingin diberdayakan dalam kelompok – kelompok sesuai dengan keinginan anggota kelompok tersebut, diperlukan peran yang lebih kongkrit dari pemerintah bekerjasama dengan lembaga NGO (non pemerintah) memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pemberdayaan bagi kelompok tersebut.

#### **2.2.4 Sasaran Pemberdayaan**

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah menurut Schumacher dalam Sulistiyani (2004) adalah pemberdayaan adalah bagian dari masyarakat miskin sesungguhnya memiliki daya untuk dibangun. Kemiskinan disini menyangkut kesejahteraan (*welfare*), kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutup akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses

terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi tiap generasi.

Pemberdayaan disini dimaksudkan bahwa masyarakat atau individu yang berada pada suatu daerah pinggiran perkotaan yang memiliki masalah dan cita – cita yang sama, pada akhirnya merasa perlu membentuk komunitas atau organisasi kemasyarakatan guna mencapai maksud dan tujuan mereka, menurut Schubeler (1996) masalah yang dibicarakan antara lain menyangkut, keamanan, pengembangan permukiman kumuh, degradasi lingkungan, jasa sosial dan rendahnya pendapatan, dll yang pada akhirnya merasa perlu untuk membentuk suatu organisasi kemasyarakatan.

Terbentuknya organisasi kemasyarakatan merupakan proses yang alami, dimana ketika adanya pertemuan antara tetangga dan dimulai dengan menceritakan masalah dan keinginan yang dihadapi secara bersama, hal ini tentunya terjadi di negara lain yang tingkat demokrasiya tinggi, sedangkan di negara kita perlu adanya pihak luar yaitu pemerintah dan organisasi non pemerintah (NGO) yang memobilisasi atau mengupayakan terbentuknya organisasi tersebut.

#### **2.2.5 Peran Warga Dalam Perencanaan**

Peran yang dapat dimainkan oleh seorang warga didalam organisasi perencanaan sangat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Peran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain tujuan dan kebutuhan organisasi, undang-undang, peraturan, tekanan dan tuntutan warga. Secara umum ada 5 (lima) peran yang dimainkan oleh warga dalam perencanaan. (Burke, 2004)

- **Sebagai Tinjauan dan Komentar**

Peran warga, warga diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana yang diusulkan. Komentar dapat dibuat tetapi organisasi perencana (op) tidak terikat untuk mengubah dan memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang dirancang untuk menyediakan informasi kepada warga dan kelompok.

- **Sebagai Konsultasi**

Peran warga pertama, warga diangkat dan diminta masukan serta informasi khusus. Metoda yang dipergunakan untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan kuesioner. Peran warga sebagai konsultan, menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan perencanaan. Peran warga kedua, untuk menemukan hambatan-hambatan potensial pada isu serta usulan perencanaan. Penggunaan pertemuan yang melibatkan individu dan kelompok yang luas merupakan teknik yang membantu dalam menemukan sikap terhadap suatu rencana.

- **Pemberi Nasehat**

Peran warga, warga diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi perencana (op) tersebut, komite-komite tersebut seperti pemberi nasehat. Karena keanggotaannya didalam organisasi, pengaruh yang dimiliki oleh warga dengan jenis peran ini akan lebih besar dari pada jenis peran sebelumnya. Tujuan peran ini adalah untuk memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk kegiatan-kegiatan perencanaan.

### ○ **Pengambilan Keputusan Bersama**

Peran warga, warga bertindak sebagai mitra di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Masing-masing peran dianggap penting di dalam proses perencanaan. Tujuannya untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan tim peencana warga-perencana.. Peran ini dapat diketahui melalui partisipasi formal para warga didalam berbagai komite dan tugas yang luas.

### ○ **Pengambilan Keputusan Terkendali**

Peran warga, warga memiliki wewenang penuh atas semua kebijakan dan keputusan perencanaan. Peran dari para staf profesional adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk bertindak sebagai penasihat dan meyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh warga. Peran ini sangat umum untuk organisasi yang bersifat sukarela

## **2.3 MUSRENBANG**

Proses Pembangunan meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel). Pembahasan proses pembangunan dalam penelitian ini dibatasi pada Musrenbangkec dengan alasan bahwa lingkup spasial tingkat musyawarah perencanaan di tingkat menengah adalah Kecamatan.



### **2.3.1 Pengertian Musrenbang**

Berdasarkan surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1354/M.PPN/03/2004/050/744/SJ, maka Musrenbang ini sangat penting dilakukan dalam rangka sinkronisasi kegiatan-kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintah dengan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

### **2.3.2 Tujuan Musrenbang**

Musrenbang diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa/Kelurahan dan/atau dibahas kembali ke tingkat Kecamatan.

### **2.3.3 Proses dan Mekanisme Musrenbang**

Ada tiga tahapan penting dalam musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG), yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut (implementasi). Hal – hal yang diperlukan pada tahap persiapan Musbangkel (Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003) .

1. Mengadakan pertemuan bersama Lurah, RW, RT dan pengurus LPMK serta unsur terkait guna membahas pembentukan panitia (SK Lurah), peserta dan nara sumber yang diundang, pembentukan tim pemandu, kelengkapan alat dan bahan, penetapan tim tindak lanjut Musbangkel, ketetapan aturan main Musbangkel, penetapan tujuan, materi, dan proses Musbangkel, jadwal proses Musbangkel, dan kesepakatan tanggal pelaksanaan.

2. Mengkompilasi informasi pendukung yang diperlukan untuk materi dan proses Musbangkel.
3. Memfasilitasi komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait.

Hal – hal yang diperlukan pada pelaksanaan Musrenbang, pembinaan proses Musrenbang harus dilakukan dari pihak kecamatan yang telah ditunjuk, dan mendampingi dalam hal (Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003);

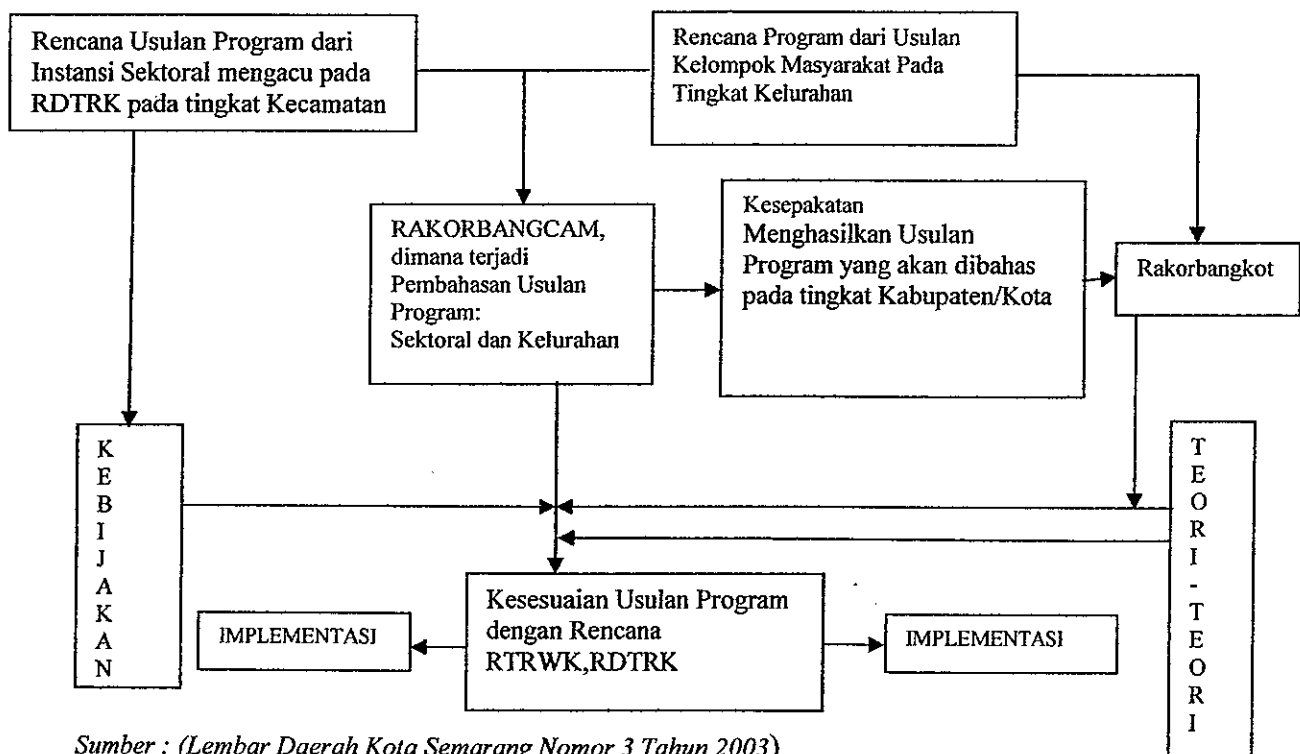
1. Mengecek kembali kelengkapan Musbangkel;
2. Memulai acara Musbangkel sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
3. Membantu memandu acara, misalnya melakukan pengenalan antar peserta, menjelaskan tujuan dan proses Musbangkel, menyepakati aturan main, dan menjelaskan alat kajian yang dipakai.
4. Membantu kegiatan dokumentasi proses dan hasil Musbangkel.
5. Membantu memfasilitasi proses dan hasil Musbangkel.
6. Membantu mefasilitasi tersusunnya rencana tindak lanjut Musbangkel.

Pada tahap pelaksanaan, melihat alat kajian yang dipergunakan meliputi, yaitu sketsa kelurahan, kalender musim, dan bagan kelembagaan. Bagan kelembagaan adalah alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan (manfaat) lembaga – lembaga di kelurahan bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

Kemudian pada tahap tindak lanjut, implementasi program tersebut, harus sesuai dengan usulan dari organisasi kelembagaan yang ada di masyarakat, dilanjutkan dengan sasaran penelitian yang pernah merencanakan, mengusulkan

dan mengerjakan program pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka dan juga melihat dampak dari program pembangunan yang sudah dilakukan sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.

Dalam tahapan usulan program dari kelompok – kelompok di masyarakat dapat diamati model partisipasi seperti apa yang terjadi dimasyarakat, hal ini akan dikaitkan dengan konsep model partisipasi yang terjadi di negara lain, dan memberikan solusi – solusi alternatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Hal ini dapat digambarkan pada diagram berikut ini :



Sumber : (Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003)

**GAMBAR 2.2**  
**TAHAPAN USULAN PROYEK PEMBANGUNAN**

Hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah (Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003) :

- a) Daftar prioritas masalah dari tingkat bawah Desa/Kelurahan.
- b) Peta potensi dan permasalahan Desa/Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll).
- c) Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.
- d) Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Desa/Kelurahan yang akan dialokasikan kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- e) Informasi dari pemerintah Kabupaten/Kota tentang isu-isu strategis daerah.
- f) Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi
- g) Evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari tahapan :

- a) Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga).
- b) Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan
- c) Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Desa/Kelurahan
- d) Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan
- e) Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW.

### 2.3.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang

Kerangka pemikiran diawali dengan adanya perbedaan pandangan dari kebijakan tentang pengusulan rencana program pembangunan pada tingkat kecamatan, perbedaan tersebut antara lain, yang pertama rencana usulan program pembangunan dari aparat pemerintahan di tingkat kelurahan maupun kecamatan (UDKP) yang mengusulkan program pembangunan, yang kedua pengusulan rencana program pembangunan dari masyarakat dalam upaya peningkatan kebutuhan masyarakat tersebut.

Diketahui bahwa usulan program yang pertama mengacu pada kebijakan RDTRK sedangkan usulan yang kedua mengacu pada kebutuhan dan aspirasi pada tingkat RT/RW dari anggota kelompok tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat, secara teori ada korelasi antara tingkat partisipasi yang terjadi dengan komunikasi, struktur kelembagaan, motivasi dalam kelembagaan, dan sikap.

Usulan rencana program tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme Rakorbangcam, dimana usulan dari masyarakat dan usulan dari sektoral akan disinergiskan dalam Rakorbangcam ini, kemudian menghasilkan kesepakatan yang merupakan usulan program untuk diajukan pada tingkat Kotamadya.

Implementasi dari usulan program ini akan berkorelasi dengan usulan dari masyarakat (kelompok organisasi) terhadap kesesuaian dengan RTRW Kota Semarang dan RDTRK Kota Semarang, jika tidak maka yang terjadi pada Rakorbangcam merupakan forum yang bersifat pemangkasan usulan program atau keinginan masyarakat.

## 2.4 VARIABEL PENELITIAN

Tahap tindak lanjut Musrenbang, tim pembinaan yang dibentuk oleh kecamatan mempunyai tugas;

1. Membantu tim tindak Musbangkel dalam pemrosesan dan penyampaian laporan hasil Musbangkel kepada camat dan unsur terkait.
2. Membantu persiapan diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).
3. Mengadakan konsolidasi dan konsultasi dengan unsur-unsur terkait di luar kelurahan tentang hasil dan tindak lanjut Musbangkel.

Pada tahap tindak lanjut, yang menjadi acuan adalah persiapan pertemuan diskusi tim Musrenbang dengan UDKP, dan yang variabel penelitian sama dengan tahap persiapan.

## 2.5 Rangkuman Teori

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu prioritas yang harus dilihat sebagai faktor pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang baik (*good government*), diketahui bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan pembangunan yang semakin terbatas dan juga supaya masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan serta dapat merasa memiliki produk dari pembangunan tersebut.

Secara Teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah hal yang penting, dan jenis partisipasi masyarakat juga berbeda, begitu pula dengan peran perencana sebagai mitra dari masyarakat, hal ini sangat tergantung dari pola kebijakan pemerintah.

Beberapa alasan pembenaran yang dijadikan hipotesis dalam penelitian partisipasi adalah:

- 1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- 2) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri;
- 3) Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal;
- 4) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan peencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 5) Terjadi pergeseran peran utama dalam penyusunan rencana, dari sektor publik (pemerintah) sebagai peran utama ke kolaborasi aktif antar unsur masyarakat.
- 6) Proses perencanaan strategis merupakan proses pembelajaran masyarakat, dalam arti semakin lama semakin mapan dalam sumber daya kelembagaan maupun dalam hal cara melakukan perencanaan.

Partisipasi masyarakat pada tingkatan yang paling tinggi adalah pemberdayaan. Konsep Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan, hal ini dipahami di negara lain tentunya berbeda dengan yang akan di terapkan di negara kita. Konsep pemberdayaan ini masyarakat dibentuk oleh masyarakat sendiri

secara alami dimulai dari sesama tetangga mereka atas dasar kesamaan masalah dan keinginannya.

Pemberdayaan dapat terjadi bila masyarakat diwadahi dalam suatu organisasi atau lembaga, yang mempunyai masalah dan keinginan bersama. Oleh pemerintah pemberdayaan sudah diwadahi dalam LPMK (Lembaga Pemberdayaan Kelurahan), agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka.

Sejauh mana, bentuk yang bagaimana serta pengaruh yang bagaimana dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan dalam tingkat kecamatan dapat terlihat pada dinamika masyarakat pada lingkup yang paling bawah yaitu masyarakat kelurahan.

Pada masyarakat kelurahan, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan dalam Musrenbang, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, tahapan tersebut antara lain; tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut. Yang menjadi variabel penelitian-penelitian adalah; *kehadiran dan keaktifan penduduk dalam rapat-rapat Musrenbang.*



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN GAJAHMUNGKUR, KOTA SEMARANG**

### **3.1 Permasalahan Partisipasi Dalam Penentuan Program Strategis di Kota Semarang**

#### **3.1.1 Lingkup Makro Kota Semarang**

Keberadaan Kota Semarang, dengan 16 Kecamatan, 177 Kelurahan, 1303 RW dan 8294 RT terdapat permasalahan yang kompleks. Adapun permasalahan yang menarik untuk diteliti dalam lingkup makro kota Semarang pada penelitian ini menyangkut;

- Yang pertama adalah adanya program pembangunan yang dihasilkan melalui mekanisme proses rapat kerja koordinasi pembangunan pada tingkat Kota madya (Rakorbangkot) sampai ke Kelurahan (Rakorbangkel), dimana aspirasi dan keinginan masyarakat selayaknya terakomodir dari tingkat RT /RW sampai dengan lingkup Kota Semarang. Program pembangunan yang dihasilkan melalui mekanisme ini akan berbentuk pada proyek pembangunan dan Swadaya masyarakat ditingkat kelurahan, sampai RT/RW.
- Yang kedua, Propinsi Jawa Tengah sebagai urutan keempat penerima dana Bantuan dari Bank Dunia pada tahap Pertama tahun 1999, yang dikhususkan untuk masyarakat miskin perkotaan, yang oleh pemerintah dibentuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program ini dibiayai oleh Bank Dunia, tentunya akan bersinergis atau sebagai pendamping dengan

program yang berasal dari dana APBD kota dalam menjawab segala tuntutan, aspirasi masyarakat dan usaha pemberdayaan masyarakat yang berkembang di tingkat kecamatan hingga ke kelurahan.

Program pemerintah berupa program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), menurut data rencana alokasi Dana P2KP Tahun 1999, Jawa Tengah berada pada urutan keempat (4) penerima bantuan P2KP terbesar, hal ini tentunya berindikasi kepada adanya kantong – kantong kemiskinan dan kondisi geografis yang rentan pada daerah perkotaan teristimewa pada kelurahan – kelurahan tertentu dengan populasi penduduk yang tertentu pula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**TABEL III.1**  
**RENCANA ALOKASI DANA P2KP**

<b>Propinsi</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Alokasi Bantuan (Rp)</b>
DKI Jakarta	7.739.731	244.350.000
Jawa Barat	12.048.110	298.050.000
<b>Jawa Tengah</b>	<b>4.539.906</b>	<b>112.900.000</b>
DI. Yogyakarta	1.690.344	42.100.000
Jawa Timur	6.097.299	160.750.00

*Sumber : Manual P2KP, 1999 dalam Sulistiyani (2004)*

### 3.1.2 Lingkup Mikro Kecamatan Gajah Mungkur

Secara Mikro, permasalahan yang menarik untuk diteliti pada kecamatan Gajah Mungkur yang memiliki 8 Kelurahan dan 47 RW serta 306 RT adalah;

- 1) Adanya produk rencana tata ruang kota berupa RDTRK yang menetapkan kecamatan gajah mungkur memegang peranan sebagai fungsi perekenomian,

pendidikan, dan perkantoran, produk rencana ini merupakan salah satu bentuk perencanaan *top down*.

- 2) Akibatnya timbul aktifitas-aktifitas perekonomian, pendidikan dan perdagangan, yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan, dan tidak adanya dukungan pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dalam musbangkel dan rakorbangcam maka terjadi dinamika pemanfaatan ruang yang tidak terkontrol.
- 3) Pada proses musbangkel pada kecamatan Gajah Mungkur, ada beberapa tahapan perencanaan. Kelihatannya berdasarkan data – data sementara berupa daftar hadir yang ada proses musbangkel merupakan formalitas belaka, karena tidak melalui mekanisme yang diharapkan.
- 4) Ada 3 kelurahan dalam kecamatan Gajah Mungkur yang menerima Dana Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2004 yaitu; Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan Petompon dan Kelurahan Sampangan. Hal ini menunjukkan adanya kantong – kantong kemiskinan di perkotaan pada Kecamatan tersebut, dilihat dari jumlah penduduk dan banyaknya RT/RW pada wilayah tersebut, sedangkan ada beberapa kecamatan lain belum mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam kebijakan tata ruang, bahwa wilayah selatan yang meliputi (Banyumanik, Gajahmungkur dan Candi ) telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman. Sedangkan konsep penentuan BWK dan masing-masing fungsi yang

diemban oleh Bagian Wilayah Kota (BWK) telah ditetapkan dengan arahan kesamaan fungsi – fungsi kawasan, batasan fisik wilayah serta kemudahan aksesibilitas, sebagai arahan fungsi pengembembangan masing – masing BWK, khusus untuk BWK II yang meliputi Gajah Mungkur dan Candisari sebagai arahan fungsinya adalah Pendidikan, Olah Raga, Lingkungan, Budaya dan Sejarah, Permukiman, campuran Perdagangan dan Jasa, Perkantoran.

### **3.2 Identifikasi Potensi Kegiatan Di Kecamatan Gajah Mungkur**

Potensi kegiatan yang berada pada kecamatan Gajah Mungkur meliputi; Fungsi Pendidikan tinggi di Kelurahan Bendan Duwur ,Bendan Ngisor, Petompon,Gajah Mungkur dan Jati Ngaleh. Fungsi Perkantoran di sepanjang Jalan Sultan Agung dan bebarapa kelurahan yang menjadi Fungsi Perkantoran meliputi Kelurahan Petompon, Karang Rejo. Kawasan khusus militer di Kelurahan Gajah Mungkur. Permukiman penduduk tersebar secara merata di setiap Kelurahan. Fungsi Perdagangan dan Jasa beberapa kelurahan yang berkembang menjadi fungsi perdagangan dan jasa meliputi kelurahan Gajah Mungkur, Fungsi Campuran (permukiman dan perdagangan) meliputi kelurahan Sampangan dan Petompon, fungsi kawasan olah raga dan rekreasi meliputi kelurahan Karang Rejo.

Berdasarkan Rencana Pertimbangan Struktur Pelayanan maka Bagian Wilayah Kota II (BWK II) dibagi menjadi 4 (empat sub BWK) sebagai unit analisis peruntukan tanah terkecil dengan sub bloknya, sedangkan untuk kecamatan Gajah Mungkur terbagi menjadi:

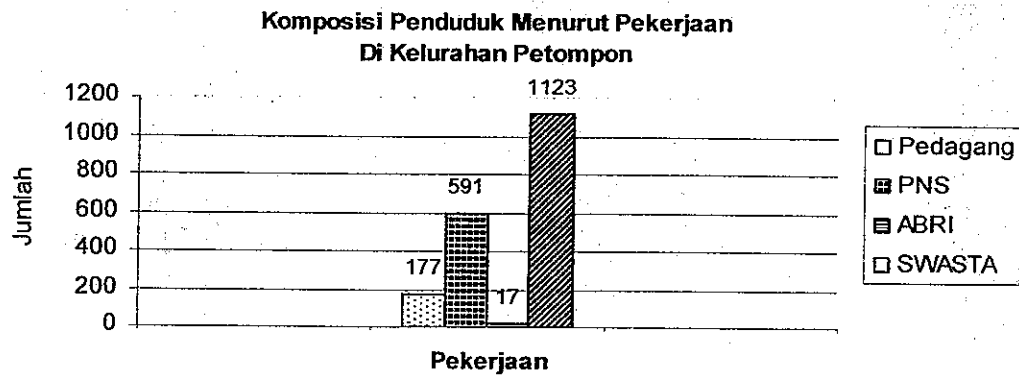
**TABEL III.2**  
**SUB BAGIAN WILAYAH KOTA KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**

Sub 1 BWK II	Blok	Kelurahan
	Blok 1.1	Petompon
	Blok 1.2	Bendan Ngisor
	Blok 1.3	Bendan Duwur
	Blok 1.4	Sampangan
Sub 2 BWK II	Blok 2.1	Bendungan
	Blok 2.2	Lempongsari
	Blok 2.3	Gajah Mungkur
	Blok 2.4	Karang Rejo

*Sumber : RDTRK BWK II Kota Semarang 2000 - 2010*

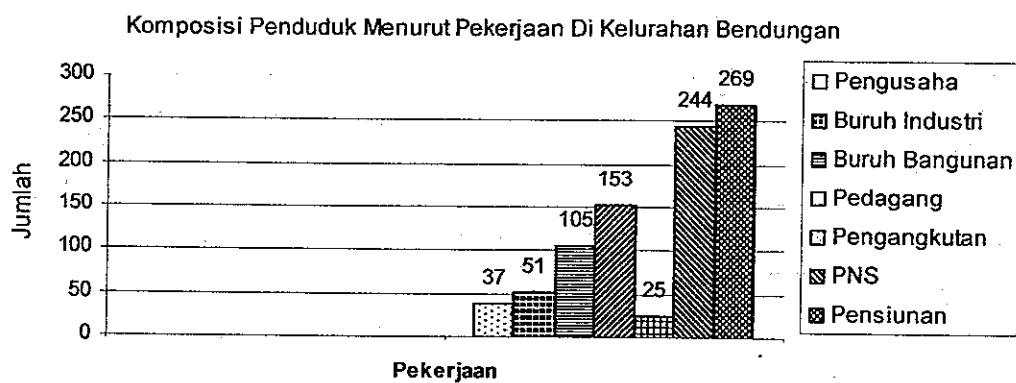
### 3.3 Keberagaman Kepentingan di Kecamatan Gajah Mungkur

Kegiatan ekonomi dan bentuk organisasi sosial merupakan indikator yang membedakan kehidupan pedesaan dengan perkotaan. Penduduk di pedesaan sebagian besar bekerja sebagai petani dan mengembangkan *organisasi sosial bersifat organis*, sedangkan di perkotaan bekerja di Industri, perdagangan dan jasa dan cenderung membentuk *organisasi yang bersifat mekanis*. Kecamatan Gajah Mungkur memiliki pola hidup perkotaan, hal ini terkait dengan aktivitas- aktivitas yang terjadi dari fungsi yang terdapat pada kawasan Kecamatan tersebut, sehingga pola organisasi juga bersifat mekanis. Berdasarkan data monografi kelurahan menurut mata pencaharian, maka secara umum umum dapat dipelihatkan sebagai berikut:



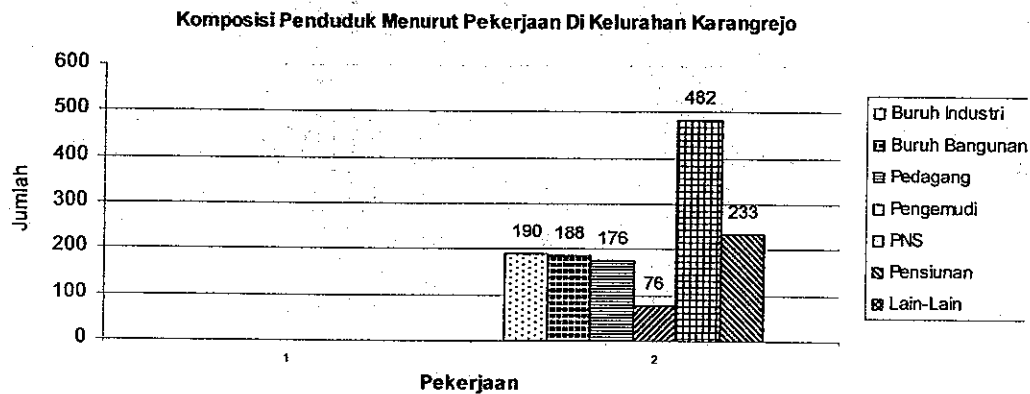
Sumber : Data Monografi Kelurahan Petompon, 2004

**GAMBAR 3.1**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN PETOMPON, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



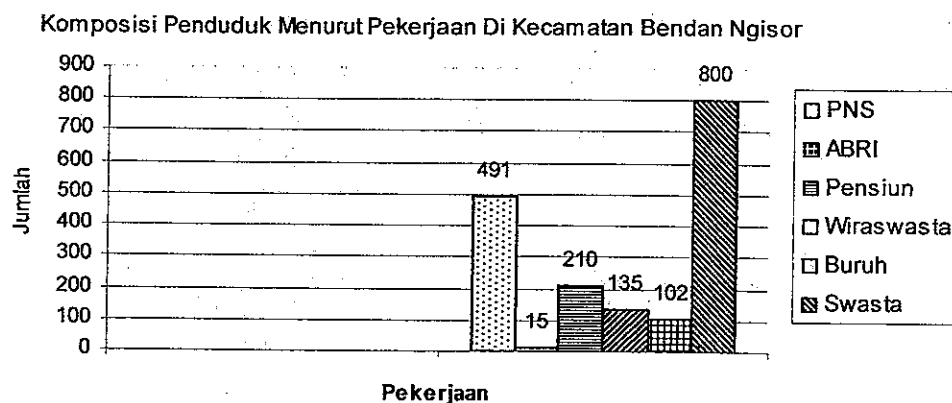
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bendungan, 2004

**GAMBAR 3.2**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN BENDUNGAN, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



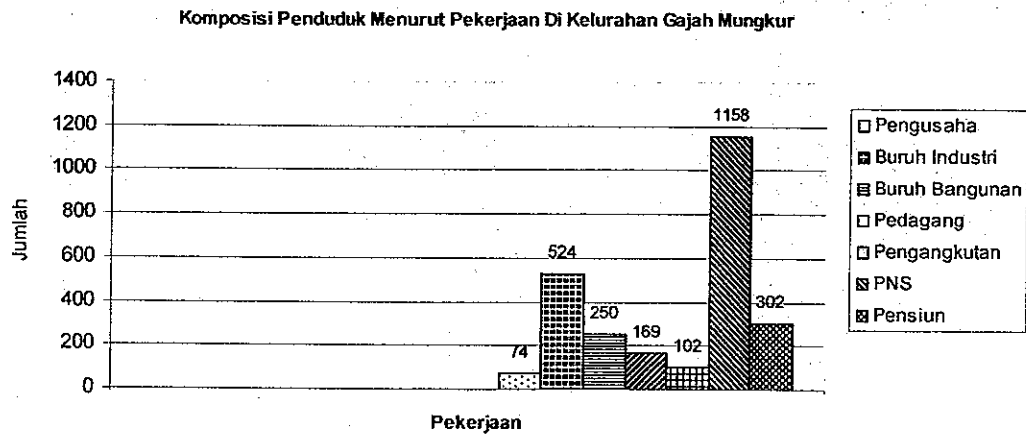
Sumber : Data Monografi Kelurahan Karangrejo, 2004

**GAMBAR 3.3**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN KARANGREJO, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



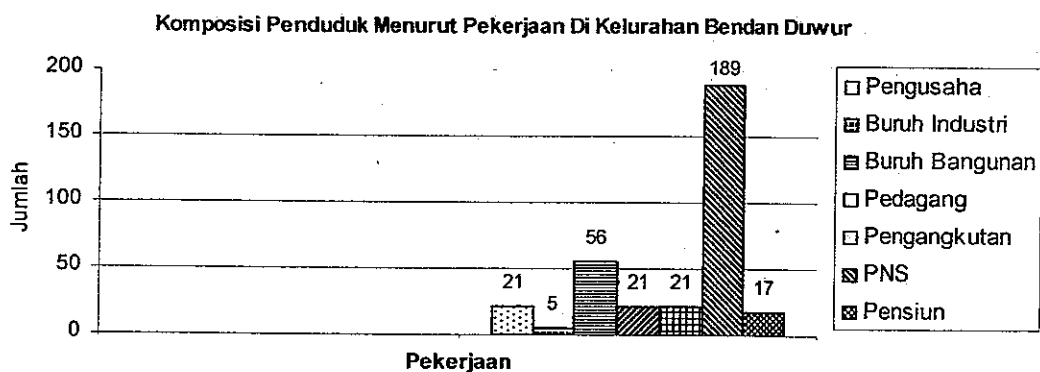
Sumber : Data Monografi Kelurahan Bendan Ngisor, 2004

**GAMBAR 3.4**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN BENDAN NGISOR, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



Sumber : Data Monografi Kelurahan Gajah Mungkur, 2004

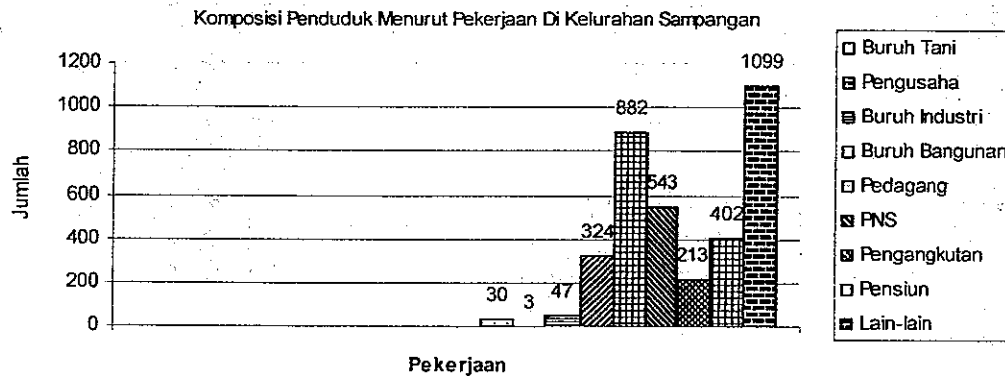
**GAMBAR 3.5**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN GAJAH MUNGKUR, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



Sumber : Data Monografi Kelurahan Bendan Duwur, 2004

**GAMBAR 3.6**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN BENDAN DUWUR, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



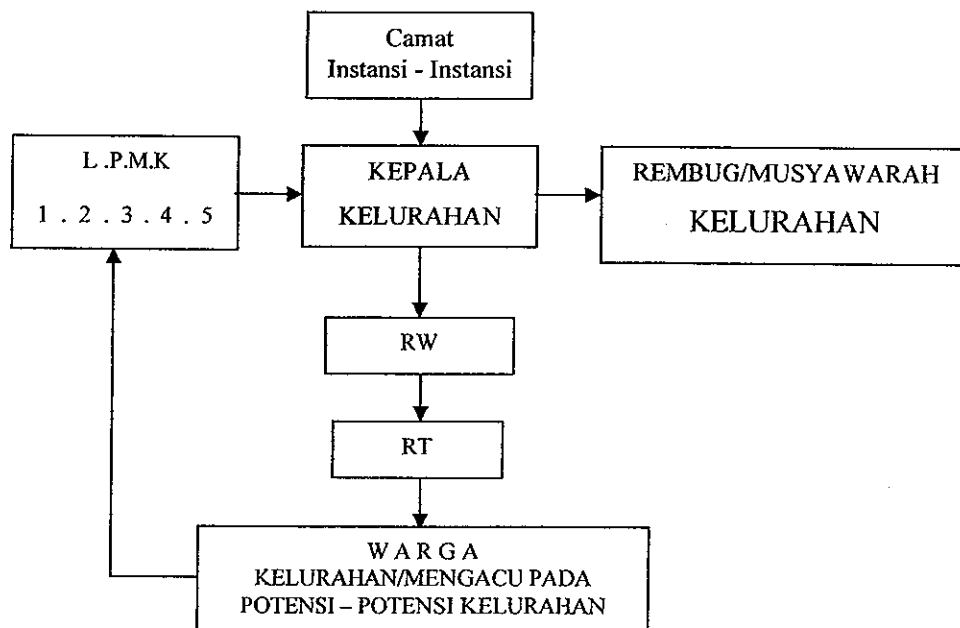


Sumber : Data Monografi Kelurahan Sampangan, 2004

**GAMBAR 3.7**  
**KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN**  
**DI KELURAHAN SAMPANGAN, KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**

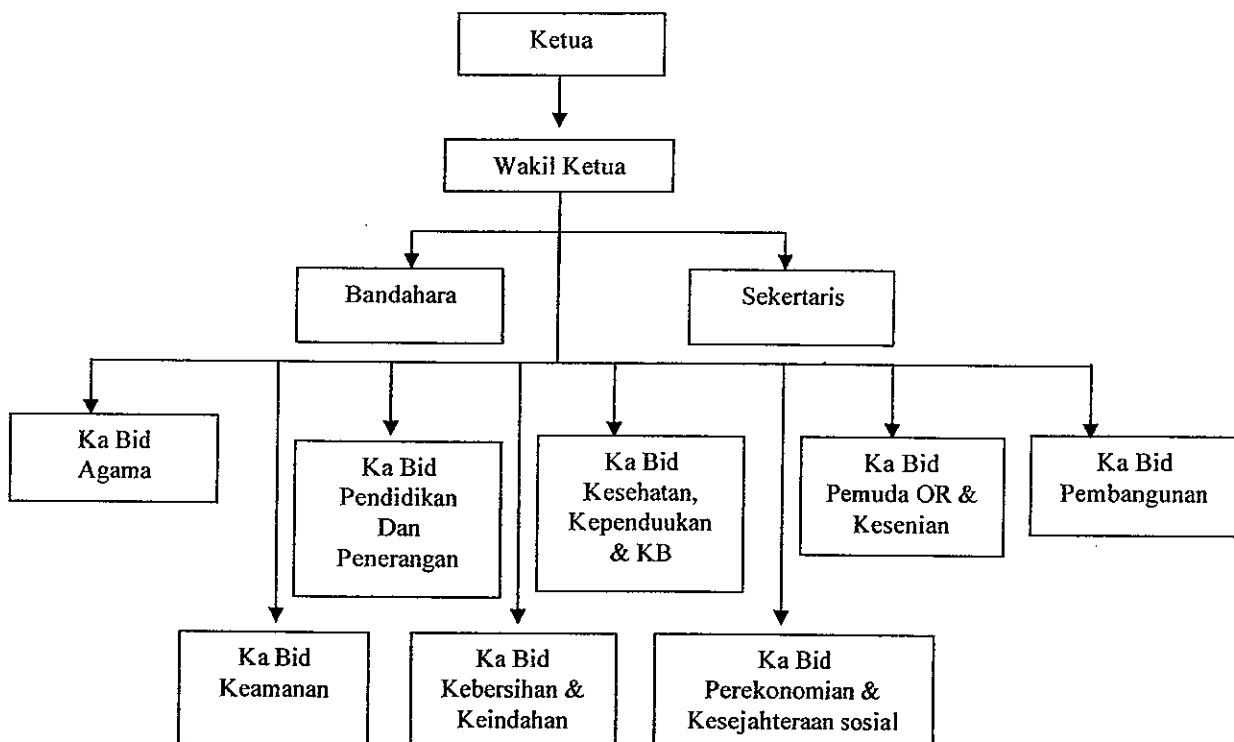
### 3.4 Identifikasi Kelembagaan di Kecamatan Gajah Mungkur

Kecamatan di Gajah Mungkur memiliki 8 (delapan) Kelurahan yaitu; kelurahan Petompon, Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Gajah Mungkur, Lempongsari, Bendungan dan Karang Rejo. (Struktur Pemerintahan). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 3.8 dan 3.9 berikut ini;



Sumber : Surjadi ( 1976 : 316)

**GAMBAR 3.8**  
**STRUKTUR KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN**  
**KECAMATAN GAJAH MUNGKUR**



Sumber : Data Struktur Kec Gajah Mungkur, 2004

**GAMBAR 3.9**  
**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

Mengacu pada struktur organisasi tersebut telah ditetapkan bahwa struktur tersebut merupakan salah satu cara pemberdayaan dalam mengakomodir kelompok – kelompok yang ada dimasyarakat dalam lingkup tiap – tiap kelurahan pada kecamatan.

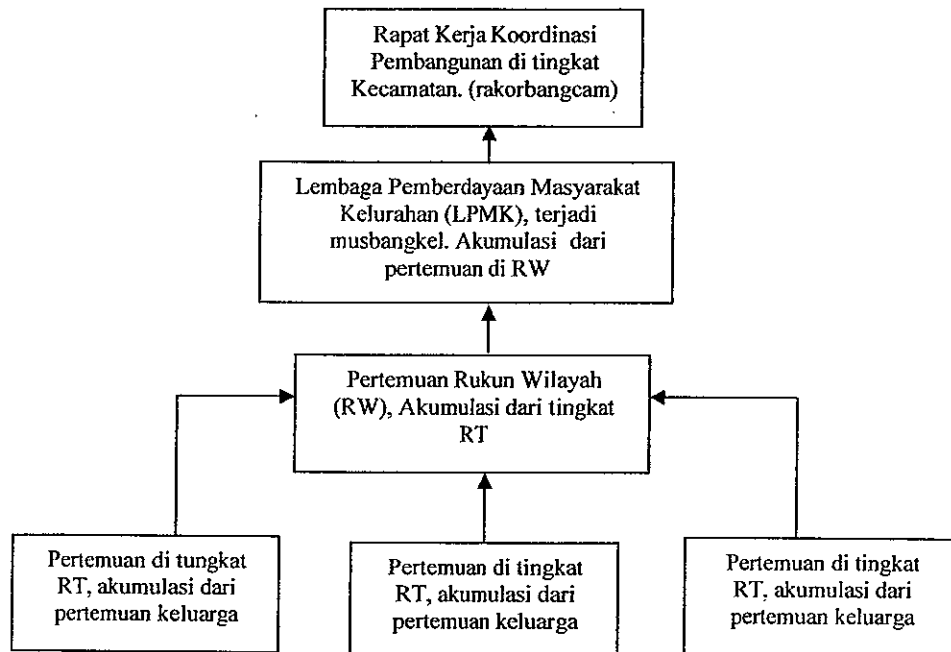
### **3.5 Proses Pengusulan Program pada Rakorbangcam**

Proses pengusulan program pembangunan dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), dimana warga menyampaikan segala cita – cita dan masalah mereka dalam pertemuan antara tetangga, hasil dari proses perencanaan ditingkat RT ditampung dalam rencana RT, setelah aspirasi yang tertampung ditingkat RT dibawa pada pertemuan tingkat Rukun Wilayah (RW), dan pada tingkat RW merupakan aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan dari secara kumulatif dari tingkat RT pada kelurahan setempat, pada tingkat RW akan dilanjutkan pada tingkat Kelurahan.

Proses pada musyawarah kelurahan (musbangkel), merupakan musyawarah penjangkangan aspirasi dan kebutuhan dari masing – masing rukun wilayah (RW) pada lingkungan kelurahan setempat, dari sini akan diproses dan diusulkan prioritas dari aspirasi kebutuhan utama dari kelurahan setempat. Pada proses musbangkel merupakan penjangkangan aspirasi berdasarkan skala prioritas yang akan disampaikan pada musbangcam.

Pada proses musbangcam, terjadilah sejumlah aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan dari masing – masing kelurahan pada tingkat kecamatan setempat. Hasil

dari proses rakorbangcam merupakan prioritas program pembangunan yang pernah diusulkan pada tingkat rukun tetangga (RT).



*Sumber : Data Struktur Kec Gajah Mungkur, 2004*

**GAMBAR 3.10**  
**PROSES RAPAT KERJA KOORDINASI PEMBANGUNAN**  
**DI KECAMATAN**

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur. Analisis tingkat partisipasi masyarakat dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tanggapan penduduk Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang, yang meliputi keikutsertaan dan keaktifannya dalam menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, dan Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW.

Analisis berikutnya adalah analisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur, yang dilakukan untuk mengetahui variabel karakteristik penduduk yang memiliki hubungan, pengaruh, serta perbedaan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Untuk lebih jelasnya, maka setiap analisis akan dijelaskan pada subbab-subbab berikut ini:

#### **4.1 Analisis Karakteristik Penduduk Kecamatan Gajahmungkur**

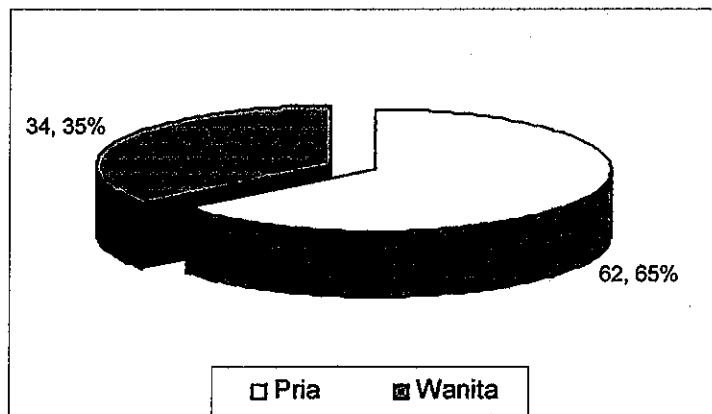
##### **4.1.1 Jenis Kelamin Penduduk**

Jenis kelamin penduduk Kecamatan Gajahmungkur ini terdiri dari pria dan wanita. Berdasarkan hasil kuesioner dapat terlihat bahwa komposisi pria lebih banyak daripada wanita, yaitu sebesar 64%. Untuk lebih jelasnya, rincian jenis kelamin penduduk di Kecamatan Gajahmungkur ini dapat dilihat pada tabel IV.1 dan gambar 4.1 berikut ini:

**TABEL IV.1**  
**KARAKTERISTIK JENIS KELAMIN PENDUDUK KECAMATAN**  
**GAJAHMUNGKUR**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Sampel	Jenis Kelamin	
			P	W
1.	Sampangan	14	9	5
2.	Bendan Duwur	5	2	3
3.	Karangrejo	11	6	5
4.	Gajahmungkur	23	18	5
5.	Bendan Ngisor	11	10	1
6.	Petompon	13	7	6
7.	Bendungan	8	5	3
8.	Lempongsari	11	5	6
<b>Jumlah :</b>		<b>96</b>	<b>62</b>	<b>34</b>

*Sumber : Hasil Analisis 2005*



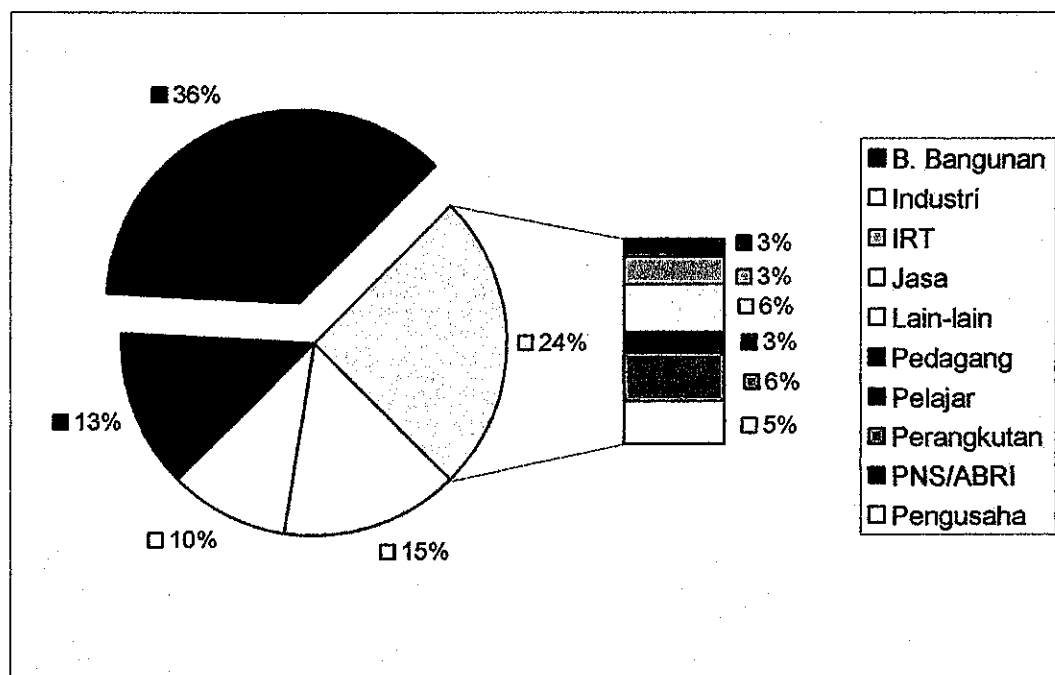
*Sumber : Hasil Analisis 2005*

**GAMBAR 4.1**  
**KARAKTERISTIK JENIS KELAMIN PENDUDUK**  
**KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

#### 4.1.2 Jenis Pekerjaan Penduduk

Jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Gajahmungkur sangat bervariasi, ada yang bekerja di sektor perindustrian, perdagangan, jasa, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dari beberapa macam bentuk pekerjaan penduduk Kecamatan Gajahmungkur, persentase terbesar adalah mereka yang bekerja pada sektor pemerintahan (PNS/ABRI). Hal ini tercermin dari pernyataan responden, yaitu sebagian besar (38%) dari 96 responden menyatakan mereka pekerja pada sektor pemerintahan. Selain sebagai pekerja pada sektor

pemerintahan, sebagian besar (16%). responden bekerja pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan persentase terkecil adalah pengusaha, yaitu sebesar 3% dari seluruh responden. Di Kecamatan Gajahmungkur ini tidak ada penduduk yang bekerja sebagai petani ataupun buruh tani, dan nelayan. Jenis pekerjaan responden dan persentasenya dapat dilihat pada gambar 4.2.



Sumber : Hasil Analisis 2005

**GAMBAR 4.2**  
**PERSENTASE JENIS PEKERJAAN PENDUDUK**  
**KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

#### 4.1.3 Jumlah Anggota Keluarga

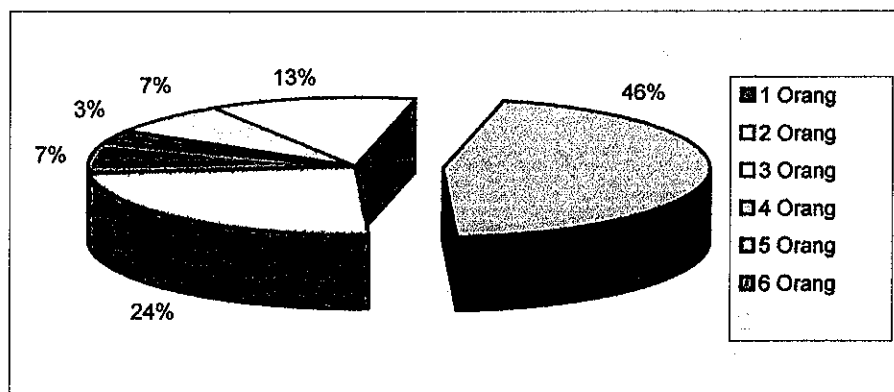
Rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk Kecamatan Gajahmungkur adalah 4 orang dengan standar penyimpangan sebesar 1 orang. Jumlah anggota keluarga terbanyak adalah 6 orang yang hanya 7.83% dari total penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan yang dalam keluarga hanya terdiri dari 1 orang adalah sebesar 2,5%. Dengan rata-rata penduduk sebesar 4 orang, maka tercermin bahwa rata-rata dalam satu keluarga

berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Penjelasan tersebut didapat dari pernyataan 96 responden yang mewakili penduduk Kecamatan Gajahmungkur dimana rincian jumlah anggota keluarga responden ini dapat dilihat pada tabel IV.2 dan gambar 4.3 di bawah ini.

**TABEL IV.2**  
**JUMLAH ANGGOTA KELUARGA**

Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase
1	3	3.13
2	7	7.29
3	12	12.50
4	44	45.83
5	23	23.96
6	7	7.29
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Analisis 2005*



*Sumber : Hasil Analisis 2005*

**GAMBAR 4.3**  
**PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA KELUARGA**

Besarnya jumlah anggota dalam keluarga penduduk Kecamatan Gajahmungkur mencerminkan bahwa sebenarnya potensi partisipasi mereka dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur cukup tinggi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi sistem pola perencanaan dan pembangunan kota ke arah yang lebih baik.



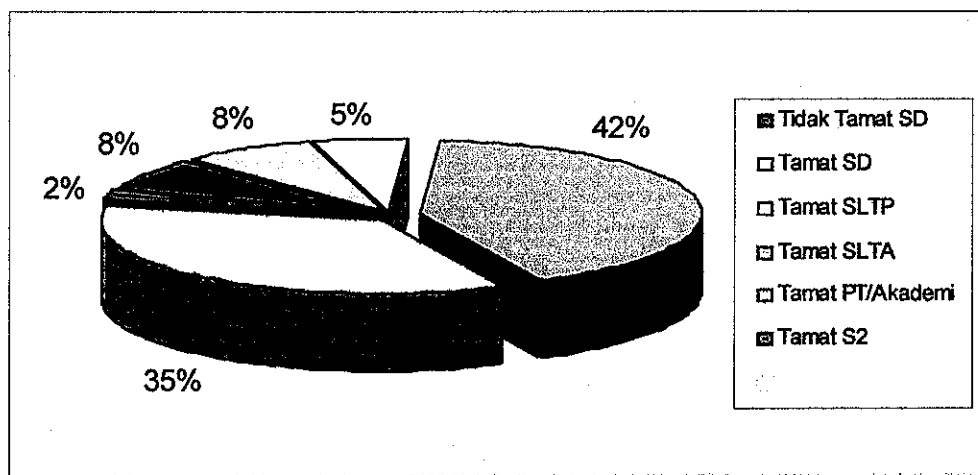
#### 4.1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Rata-rata penduduk Kecamatan Gajahmungkur telah menempuh jenjang pendidikan SLTA. Hal ini tercermin dari kuesioner yang sebagian besar (68%) responden menyatakan tamat SLTA, dan 15% tamat akademi/PT. Sedangkan penduduk yang hanya tamat SD hanya sekitar 2%. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk Kecamatan Gajahmungkur memiliki tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi ini merupakan potensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur. Untuk lebih jelasnya, rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk ini dapat dilihat pada tabel IV.3 dan gambar 4.5 dibawah ini:

**TABEL IV.3**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak Tamat SD	3	3.37
Tamat SD	7	7.87
Tamat SLTP	5	5.62
Tamat SLTA	39	43.82
Tamat PT/Akademi	33	37.08
Tamat S2	2	2.25
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Analisis 2005*

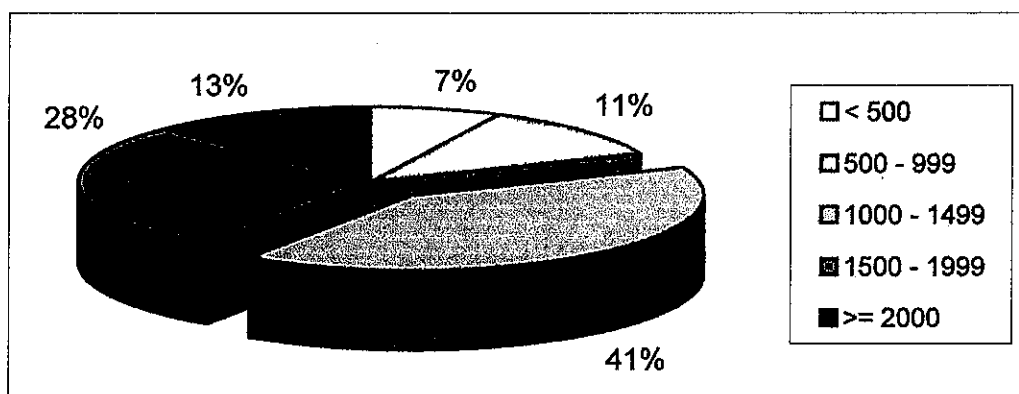


*Sumber : Hasil Analisis 2005*

**GAMBAR 4.4**  
**PERSENTASE TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK**  
**KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

#### 4.1.5 Jumlah Pendapatan Keluarga

Jumlah pendapatan rata-rata keluarga responden dalam satu bulan rata-rata adalah diatas 1.000.000 rupiah, yaitu 1.300.000 rupiah, dengan rata-rata 2 orang pekerja dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk Kecamatan Gajahmungkur cukup tinggi. Persentase terbanyak yaitu responden yang memiliki jumlah pendapatan keluarga 1.000.000 rupiah sampai 1.500.000 rupiah, yaitu sebesar 45%. Sedangkan persentase terkecil adalah responden yang memiliki jumlah pendapatan keluarga di bawah 500.000 rupiah.

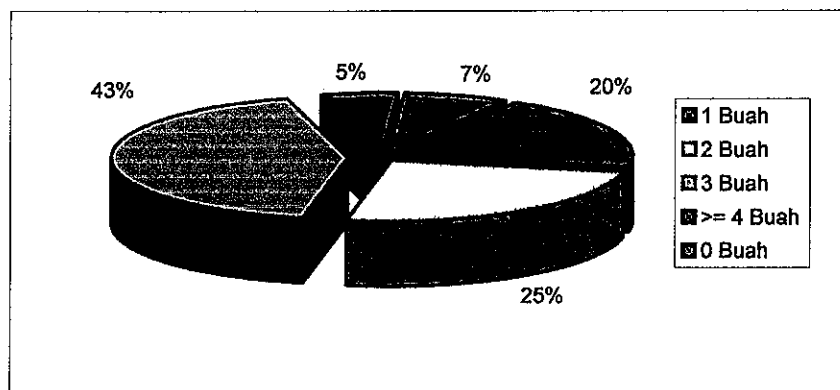


Sumber : Hasil Analisis 2005

**GAMBAR 4.5**  
**PERSENTASE PENDAPATAN KELUARGA (DALAM RIBUAN RUPIAH)**

#### 4.1.6 Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Dengan tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kecamatan Gajahmungkur yang cukup tinggi, sehingga penduduk Kecamatan Gajahmungkur ini rata-rata lebih dari satu buah kendaraan bermotor. Hal ini mencerminkan bahwa mobilitas penduduk Kecamatan Gajahmungkur cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase kepemilikan jumlah kendaraan penduduk di Kecamatan Gajahmungkur ini dapat dilihat gambar 4.6



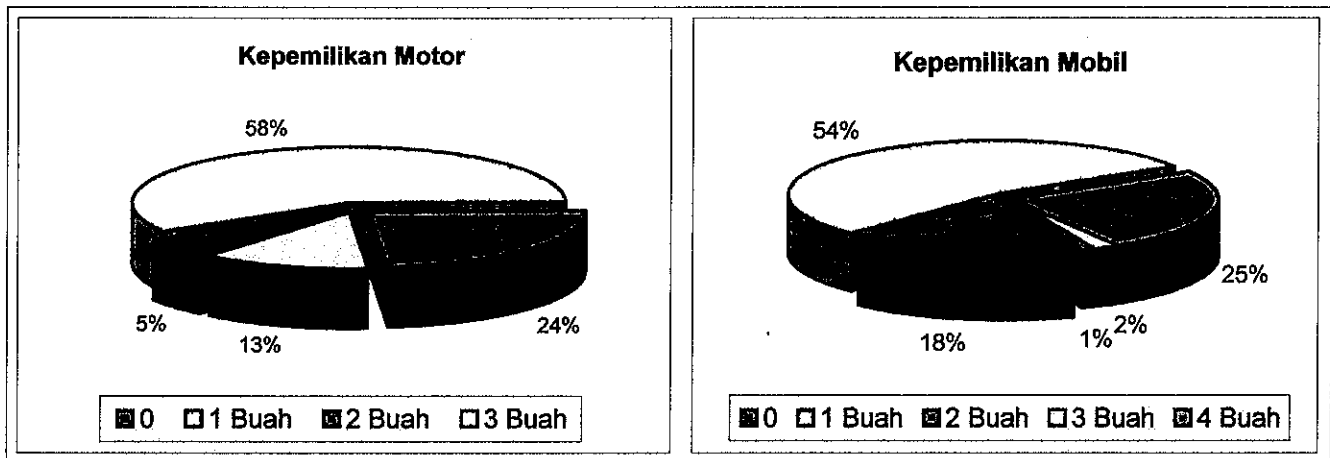
Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 4.6**  
**PERSENTASE KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR**

Untuk kepemilikan sepeda motor, hampir semua responden memiliki sepeda motor, sedangkan yang tidak memiliki sepeda motor hanya sekitar 5%. Frekuensi terbanyak kepemilikan kendaraan bermotor adalah 1 buah sepeda motor yaitu 51 responden atau sekitar 58%, dan yang memiliki 2 buah sepeda motor adalah sebesar 24%, serta yang memiliki 3 buah sepeda motor adalah 13%.

Sedangkan untuk kepemilikan mobil, sebagian besar satu mobil (54%) responden memiliki mobil, sedangkan yang tidak memiliki mobil hanya sekitar 18%. Frekuensi terbanyak kepemilikan kendaraan bermotor adalah 1 buah mobil yaitu 52 responden atau sekitar 54%, dan yang memiliki 2 buah mobil adalah sebesar 24%, serta yang memiliki 3 dan 4 buah mobil adalah masing-masing 2% dan 1%.

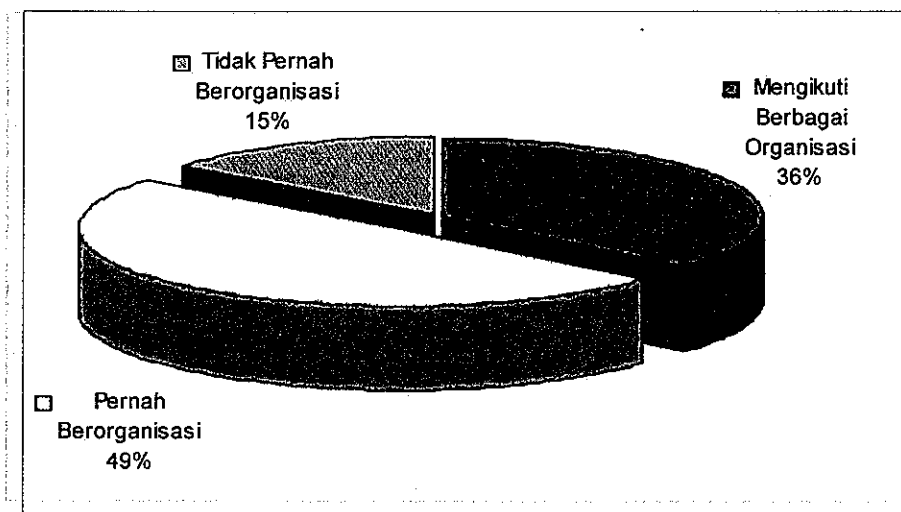
**GAMBAR 4.7**  
**JENIS KEPEMILIKAN KENDARAAN**



Sumber : Hasil Analisis 2005

#### 4.1.7 Pengalaman Berorganisasi Penduduk

Rata-rata penduduk Kecamatan Gajahmungkur telah cukup berpengalaman dalam berorganisasi, baik itu lingkup organisasi di lingkungan tempat tinggalnya maupun organisasi lingkungan pendidikannya. Hal ini tertuang pada kuesioner yang sebagian besar (55%) responden menyatakan pernah mengikuti organisasi dan 18% mengikuti berbagai macam organisasi, sedangkan 27% penduduk Kecamatan Gajahmungkur menyatakan belum pernah mengikuti organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur ini dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis 2005

**GAMBAR 4.8**  
**PERSENTASE PENGALAMAN BERORGANISASI PENDUDUK**  
**KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

#### **4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur**

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur, maka dilakukan analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tanggapan responden yang mewakili pendapat masyarakat Kecamatan Gajahmungkur terhadap partisipasinya dalam Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang ini diukur tingkat kehadiran dan keaktifan warga dalam proses Musrenbang, yang meliputi kegiatan menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat dilangsungkannya Musrenbang, serta melakukan Musrenbang.

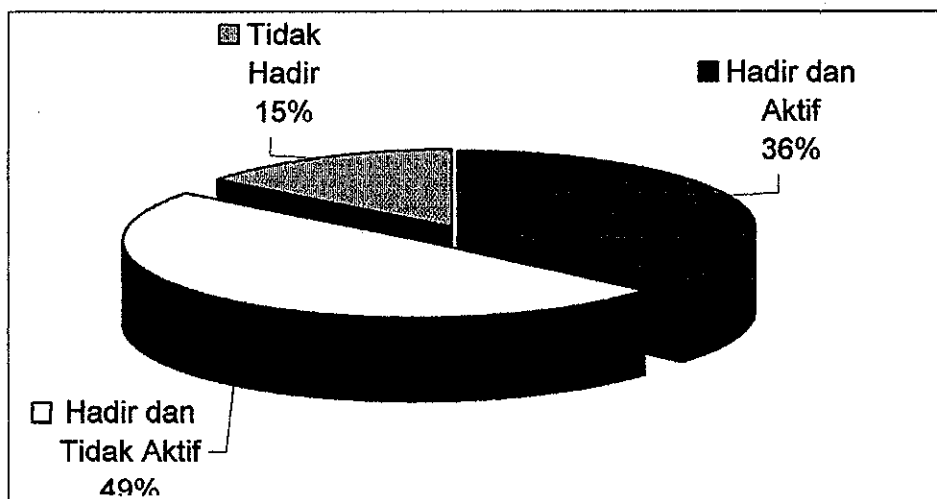
Tahap analisis ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan skor pada setiap indikator dalam variabel kehadiran dan keaktifan masyarakat

dalam proses Musrenbang seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I, sehingga akan diketahui partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur..

#### 4.2.1 Menetapkan Fasilitator

Pada dasarnya, hampir seluruh penduduk Kecamatan Gajahmungkur mendukung adanya sistem partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini ditunjang oleh karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur yang memiliki tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pengalaman berorganisasi yang cukup tinggi sehingga pandangan mereka sangat baik terhadap bentuk sistem partisipasi ini.

Penjelasan tersebut didasari oleh pernyataan responden yang mewakili penduduk Kecamatan Gajahmungkur, dimana yang hadir dan aktif dalam menetapkan fasilitator cukup besar yaitu sekitar 41%. Dan yang hanya hadir dan tidak aktif sebesar 27%. Sedangkan yang tidak hadir sebesar 32%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2005

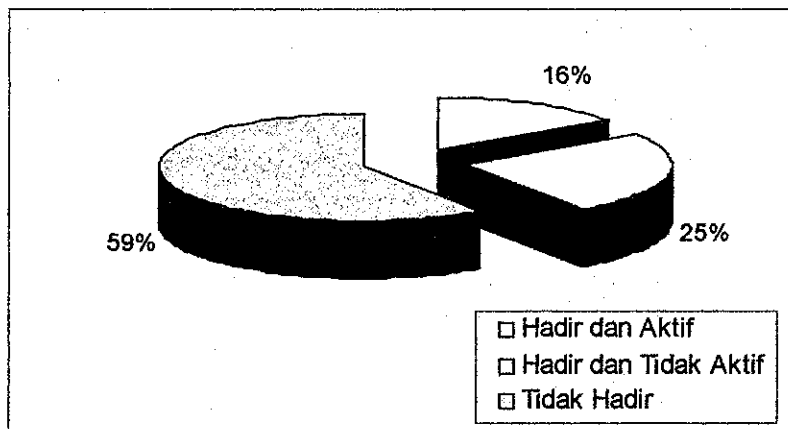
**GAMBAR 4.9**  
**PERSENTASE KEHADIRAN DAN KEAKTIFAN PENDUDUK DALAM**  
**MENETAPKAN FASILITATOR DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Gambar 4.9 diatas menunjukkan bahwa warga yang hadir dalam menetapkan fasilitator cukup besar, yaitu sebesar 85 %, sedangkan warga yang tidak hadir hanya 15 % dari keseluruhan penduduk Kecamatan Gajahmungkur. Hal ini mencerminkan masyarakat Kecamatan Gajahmungkur cukup baik berpartisipasi ketika menetapkan fasilitator dalam proses Musrenbang.

#### **4.2.2 Menyusun Jadwal dan Agenda Musrenbang**

Sesuai dengan kajian literatur yang telah dibahas pada Bab II, bahwa kehadiran dan keaktifan penduduk dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, maka kehadiran dan keaktifan penduduk dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Gajahmungkur, yaitu kurang dari hadir dan aktif, hadir akan tetapi tidak aktif, dan tidak hadir.

Berdasarkan survei primer yang telah dilakukan, maka didapat berbagai tanggapan mengenai kehadiran dan keaktifan warga dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang. Dari seluruh responden yang mewakili pernyataan warga, diperoleh bahwa sebagian besar (59%) warga tidak hadir dalam penyusunan jadwal dan agenda musrenbang, 25% hadir akan tetapi tidak aktif, dan hanya 16 % warga yang hadir dan aktif dalam penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis 2005

**GAMBAR 4.10**  
**PERSENTASE KEHADIRAN DAN KEAKTIFAN WARGA DALAM MENYUSUN**  
**JADUAL DAN AGENDA MUSRENBANG DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

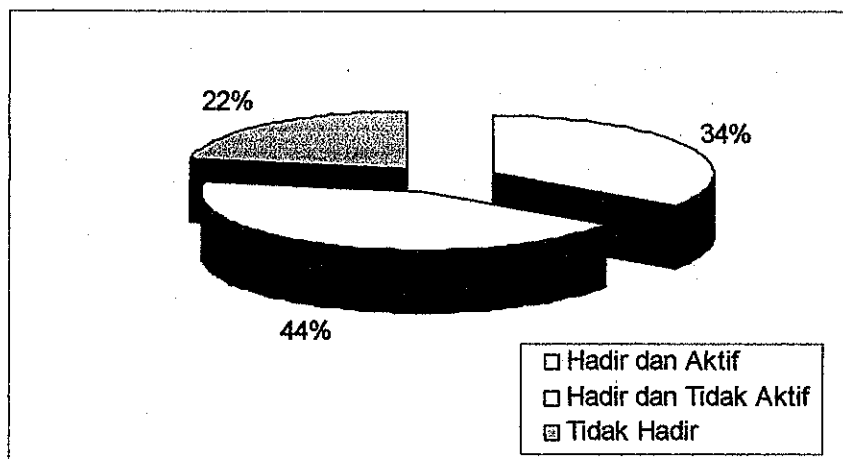
Hasil analisis mengenai partisipasi warga dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur kurang baik dalam menyusun jadwal dan agenda Musrenbang, sebab sebagian besar warga tidak hadir dan tidak aktif dalam tahap ini.

#### **4.2.3 Mempersiapkan Bahan dan Materi Musrenbang**

Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dan tinggi salah satunya dipengaruhi oleh faktor kehadiran dan keaktifan warga dalam mempersiapkan bahan dan materi dalam Musrenbang. Berdasarkan kriteria diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan acuan salah satunya faktor kehadiran dan keaktifan warga dalam mempersiapkan bahan dan materi dalam musrenbang. Dari hasil survei primer, diperoleh bahwa sebagian besar (44%) warga menghadiri rapat dalam mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, akan tetapi 44% warga ini tidak aktif dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut. Sedangkan warga yang hadir dan aktif dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut hanya 34%. Untuk



lebih jelasnya, persentase kehadiran dan keaktifan warga dalam persiapan bahan dan materi musrenbang ini dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis 2005

**GAMBAR 4.11**  
**PERSENTASE KEHADIRAN DAN KEAKTIFAN WARGA**  
**DALAM PERSIAPAN BAHAN DAN MATERI MUSRENBANG**

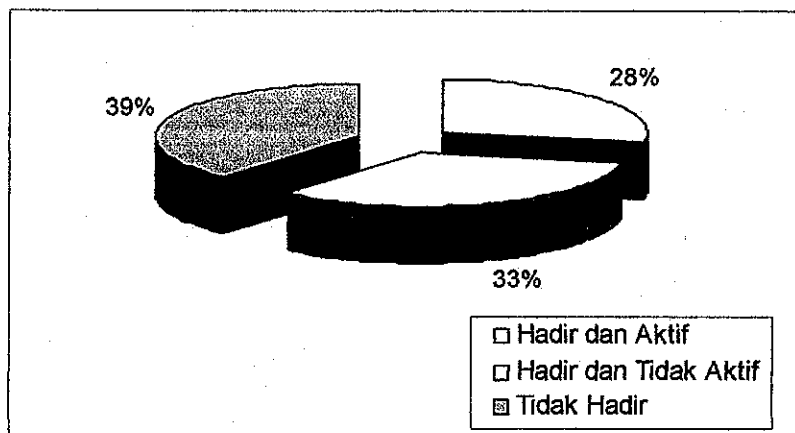
Dalam mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, partisipasi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur cukup baik. Hal ini terlihat pada gambar 4.11 di atas yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga hadir dengan persentase sebesar 78%, meskipun terdapat sebagian yang tidak aktif dalam mempersiapkan bahan dan materi tersebut.

#### **4.2.4 Mengumumkan Secara Terbuka Tentang Jadwal, Agenda, dan Tempat Musrenbang**

Setelah bahan dan materi untuk Musrenbang telah siap, maka tahapan selanjutnya adalah mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat dilaksanakannya Musrenbang kepada warga. Tahap ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan Musrenbang sebab informasi mengenai jadwal, agenda, dan tempat

dilakukannya Musrenbang ini sangat penting untuk disampaikan kepada warga. Oleh karena itu, kehadiran dan keaktifan warga ketika diumumkannya jadwal, agenda, dan tempat dilaksanakannya Musrenbang digunakan sebagai variabel dalam penentuan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Survei primer menunjukkan bahwa 39% warga tidak hadir dalam mengumumkan dan diumumkannya jadwal, agenda, dan tempat dilaksanakannya Musrenbang. 33% warga menghadiri pengumuman tersebut, akan tetapi mereka tidak aktif dalam penyampaian informasi tersebut. Warga yang hadir dan aktif dalam kegiatan ini hanya 28%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyampaian informasi ini warga kurang antusias untuk mengikutinya dan lebih memilih untuk mendapatkan informasinya dengan cara tidak langsung dalam kegiatan ini. Untuk lebih jelasnya, kehadiran dan keaktifan warga dalam kegiatan penyampaian informasi mengenai jadwal, agenda, dan tempat dilaksanakannya Musrenbang ini dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis 2005

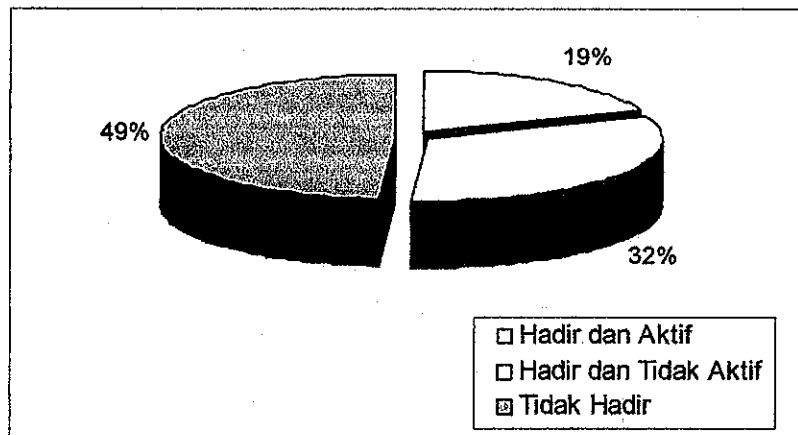
**GAMBAR 4.12**  
**PERSENTASE KEHADIRAN DAN KEAKTIFAN WARGA DALAM**  
**PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI**  
**JADUAL, AGENDA DAN TEMPAT DILAKUKANNYA MUSRENBANG**

Gambar 4.12 diatas mencerminkan partisipasi warga dalam penyampaian informasi mengenai jadwal, agenda, dan tempat dilakukannya Musrenbang cukup buruk. Hal ini terlihat bahwa hampir sekitar 72% warga tidak aktif dalam tahapan ini, bahkan 39% dari warga tidak menghadiri tahapan ini dalam Musrenbang.

#### **4.2.5 Melakukan Musyawarah/ Rembug Dusun/ RW**

Ditinjau dari dilakukannya tahapan musyawarah/rembug dusun/RW dalam Musrenbang, penduduk Kecamatan Gajahmungkur kurang mendukung adanya sistem partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini tercermin dari pernyataan mereka, dimana yang hadir dan aktif dalam melakukan musyawarah/rembug dusun/RW, hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk Kecamatan Gajahmungkur yaitu hanya 19%. Dan yang hadir dan tidak aktif sebesar 32%. Sedangkan sebagian besar (49%) tidak hadir. Untuk lebih jelasnya, presentasi kehadiran dan keaktifan penduduk Kecamatan

Gajamungkur dalam melakukan musyawarah/rembug dusun/RW ini dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini:



*Sumber : Hasil Analisis 2005*

**GAMBAR 4.13**  
**PERSENTASE KEHADIRAN DAN KEAKTIFAN WARGA DALAM**  
**MELAKUKAN MUSYAWARAH/REMBUG DUSUN/RW**

Gambar 4.12 diatas mencerminkan partisipasi warga dalam Musrenbang cukup buruk. Hal ini terlihat bahwa hampir sekitar 81% warga tida aktif dalam tahapan ini, bahkan 49% dari warga tidak menghadiri tahapan ini dalam Musrenbang.

#### **4.3 Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur**

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya mengenai kehadiran dan keaktifan penduduk Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang, maka diperoleh tingkat partisipasi warga secara keseluruhan di Kecamatan Gajahmungkur. Tingkat partisipasi masyarakat ini diperoleh dari persentase dari data primer setiap pernyataan responden mengenai keikutsertaan dan keaktifannya dalam Musrenbang, dan setiap pernyataan tersebut akan diberikan bobot/nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun

bobot masing-masing variabel, tolok ukur, dan bobot partisipasi masyarakat dalam Musrenbang tersebut dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini :

**TABEL IV.4**  
**KRITERIA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG**

No	Variabel	Tolok Ukur	Bobot
1	Menetapkan fasilitator dari masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>
2	Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>
3	Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>
4	Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>
5	Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadir dan Aktif</li> <li>• Hadir dan Tidak Aktif</li> <li>• Tidak Hadir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> <li>• 2</li> <li>• 1</li> </ul>

*Sumber : Hasil Analisis, 2005*

Kemudian berdasarkan hasil survei primer yang didapat dari pernyataan responden mengenai partisipasi mereka, serta bobot probabilitas maksimum dan minimum dari seluruh variabel partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, maka diperoleh kriteria tingkat partisipasi masyarakat menurut total skor yang pembentukannya dijelaskan berikut ini :

#### **A. Menentukan Range Data**

Range data ini didapat dari perkalian jumlah variabel partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan selisih bobot terbesar dan bobot terkecil dari kelima variabel partisipasi masyarakat yang telah disusun berdasarkan tolok ukur partisipasi masyarakat menurut kajian literatur sehingga diperoleh range data sebesar 10.

$$\text{Range data} = (3 - 1) \times 5 \text{ variabel} = 10$$

## B. Menentukan Interval Kelas

Interval Kelas digunakan untuk menentukan interval bobot yang akan dikategorikan menurut kelas-kelas kategori tingkat partisipasi masyarakat, dan dalam studi ini kategori tingkat partisipasi masyarakat terdiri dari tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, sehingga diperoleh interval kelasnya adalah 3,33.

$$\text{Interval kelas} = \frac{10}{3} = 3,33$$

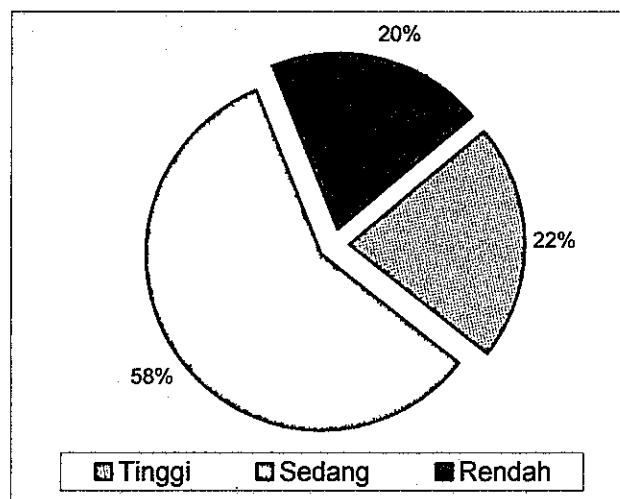
## C. Menentukan Kriteria Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Untuk menentukan kriteria tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, maka diperlukan nilai probabilitas maksimum dan minimum dari kelima variabel partisipasi tersebut. Bobot probabilitas maksimumnya adalah 15 dan bobot probabilitas minimumnya adalah 5, sehingga berdasarkan interval kelas yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 3,33, maka kriteria tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang serta total bobot/skor yang didapat adalah:

Kriteria	Tinggi	Sedang	Rendah
Total Skor	11,68 – 15	8,34 – 11,67	5 – 8,33

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan kriteria skor di atas, maka diperoleh kesimpulan tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur. Persentase tingkat partisipasi ini dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini:



*Sumber : Hasil Analisis, 2005*

**GAMBAR 4.14**  
**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG**  
**DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Hasil analisis dan gambar 4.14 diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Gajahmungkur berpartisipasi sebagian dan tidak langsung dalam Musrenbang, dan dari beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Gajahmungkur cukup berpartisipasi dalam Musrenbang yang terlihat dari persentase kehadiran dan keaktifannya yang lebih dari 50% hadir dan cukup aktif dalam Musrenbang. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur adalah sedang. Sedang-nya tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur.

Penduduk Kecamatan Gajahmungkur telah memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari pemerintah dan memperoleh informasi mengenai proses pembangunan di lingkungannya, akan tetapi belum berperan serta aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih berada pada tahap *infoming dan consultation*. Sedangkan untuk mencapai tahapan *Partnership* dalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur ini masih cukup sulit, dimana adanya berbagai faktor yang menyebabkan penduduk masih kurang aktif dan terlibat dalam proses perencanaan. Selain itu, pemerintah masih memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan sehingga pemerintah dan masyarakat tidak bisa memiliki kedudukan yang sama dalam segala bentuk perencanaan di Kecamatan Gajahmungkur.

Rincian mengenai pengaruh variabel karakteristik sosial, ekonomi, dan pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur terhadap tingkatan partisipasinya dalam Musrenbang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya :

#### **4.4 Variabel Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur**

Setelah dilakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, maka selanjutnya akan dilakukan analisis variabel yang mempengaruhinya. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis tabulasi silang, yaitu antara variabel partisipasi masyarakat dengan variabel karakteristik penduduk yang diwakili oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan latar belakang organisasi responden. Karakteristik sosial meliputi jenis kelamin, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan, sedangkan karakteristik ekonomi meliputi tingkat pendapatan dan kepemilikan kendaraan



bermotor, serta karakteristik organisasi yang mencakup latar belakang masyarakat dalam perkumpulan/organisasi.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan karakteristik penduduk, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan diantara variabel karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Adapun variabel karakteristik penduduk dan variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang digunakan adalah :

**TABEL IV.5**  
**VARIABEL KARAKTERISTIK PENDUDUK DALAM**  
**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**

No	Variabel Karakteristik Penduduk	Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat	Hubungan Yang Dianalisis
1	Jenis Kelamin	* Tinggi * Sedang * Rendah	* Ada/tidak ada hubungan yang signifikan tingkat partisipasi masyarakat dengan karakteristik penduduk * Ada/tidak ada perbedaan antara karakteristik penduduk dengan partisipasi masyarakat
2	Jenis Pekerjaan		
3	Jumlah Anggota Keluarga		
4	Tingkat Pendidikan		
5	Tingkat Pendapatan		
6	Tingkat Kepemilikan Kendaraan Bermotor		
7	Pengalaman Berorganisasi		

Sumber: hasil analisis, 2005

Analisis tingkat partisipasi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik penduduk yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur. Hasil analisis tabulasi silang antara variabel karakteristik penduduk dengan tingkat partisipasi adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.6**  
**HUBUNGAN KARAKTERISTIK PENDUDUK DENGAN**  
**TINGKAT PARTISIPASI DALAM MUSRENBANG**

Variabel	Chi-Square Hitung	Derajat Bebas	Chi-Square Tabel	Nilai Signifikansi	Koefisien Kontingensi	Ada/Tidak Ada Hubungan, Ada/Tidak Ada Perbedaan
Jenis Kelamin	4,564	6	12,6	0,601	0,191	Tidak Ada
Jenis Pekerjaan	12,154	8	15,5	0,014	0,371	Tidak Ada
Jumlah Anggota Keluarga	10,883	6	12,6	0,099	0,286	Tidak Ada
Tingkat Pendidikan	18,017	6	12,6	0,006	0,361	Ada
Tingkat Pendapatan	27,367	16	26,3	0,038	0,431	Ada
Tingkat Kepemilikan Kendaraan Bermotor	9,952	12	21,0	0,620	0,277	Tidak Ada
Pengalaman Berorganisasi	24,181	8	15,5	0,002	0,410	Ada

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan Tabel IV.6 di atas, terlihat variabel karakteristik penduduk dengan nilai Chi-Square hitung yang lebih besar dari nilai Chi-Square tabel adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman berorganisasi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pada setiap tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman berorganisasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Variabel karakteristik penduduk yang paling signifikan berpengaruh terhadap partisipasi adalah pengalaman berorganisasi, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya tingkat kesalahan pengambilan keputusan mengenai hubungan antara karakteristik penduduk dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang ini adalah sangat kecil yaitu 0,002 sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima dan terdapat hubungan serta perbedaan antara pengalaman berorganisasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Nilai koefisien kontingensi terbesar yang dimiliki oleh variabel tingkat pendapatan yaitu sebesar 0,431 (skala 1) menunjukkan adanya hubungan antara variabel tingkat pendapatan serta terdapat perbedaan yang signifikan dengan tingkat hubungan sedang (Sugiyono, 1999:216) pada setiap tingkat pendapatan responden terhadap pernyataannya mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

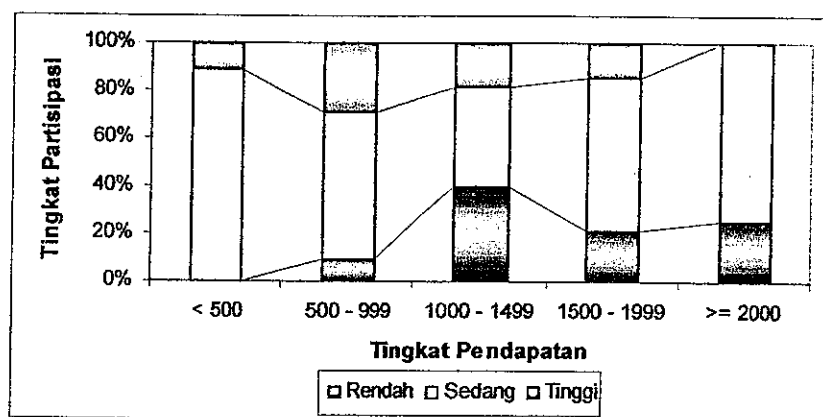
Variabel karakteristik penduduk yang tidak berpengaruh atau tidak terdapat perbedaan pada setiap karakteristik penduduk tersebut terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang adalah variabel jenis kelamin, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Chi-Square* hitung yang lebih kecil dari nilai *Chi-Square* tabel serta nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Kesimpulannya adalah bahwa terdapat tiga variabel karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Lalu, seperti apakah perbedaan yang ada dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman berorganisasi penduduk sehingga variabel ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur? Penjelasan mengenai hubungan dan perbedaan masing-masing variabel karakteristik penduduk yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang ini akan dijelaskan pada subbab-subbab berikut ini.

#### **4.4.1 Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Tingkat Pendapatan**

Pembahasan mengenai ada tidaknya hubungan antara karakteristik penduduk dengan tingkat partisipasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan perbedaan antara tingkat pendapatan penduduk Kecamatan Gajahmungkur dengan tingkat partisipasi seperti yang terlihat pada tabel IV.6. Artinya, terdapat perbedaan pada setiap tingkat pendapatan penduduk Kecamatan Gajahmungkur terhadap tingkat partisipasinya dalam Musrenbang. Hal ini tercermin dari hasil survei primer yang telah dilakukan terhadap 96 responden, bahwa tingkat pendapatan responden berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka, sebab nilai *Chi-Square* hitung lebih besar dari nilai *Chi-Square* tabel dengan nilai

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 27,367 sedangkan nilai *Chi-Square* tabel dengan derajat bebas 16 adalah 26,3. Besarnya hubungan dan perbedaan dapat dilihat dari nilai koefisien kontingensi sebesar 0,431 dalam skala 1, yang menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan memiliki hubungan yang sedang (Sugiyono,1999:216) dengan tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang. Hubungan dan perbedaan ini dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2005

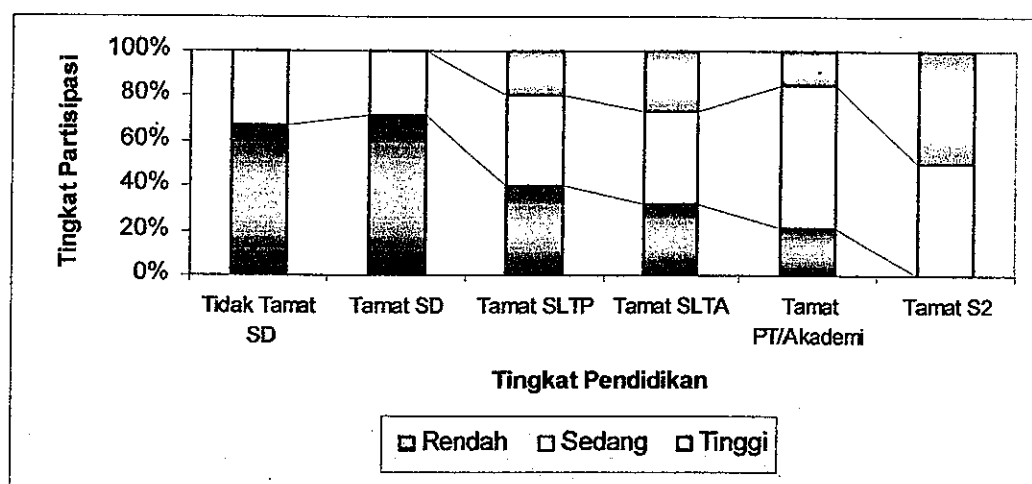
**GAMBAR 4.15**  
**HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN**  
**DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG**

Gambar 4.15 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi penduduk, dimana pada gambar terlihat peningkatan pendapatan penduduk menyebabkan persentase tingkat partisipasi penduduk yang sedang dan tinggi cenderung menurun dan tingkat partisipasinya rendah. Kesimpulannya, bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat pendapatan penduduk.

#### 4.4.2 Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Tingkat Pendidikan

Ada tidaknya hubungan antara tingkat partisipasi dan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Gajahmungkur menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan perbedaan antara

tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Gajahmungkur dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang seperti yang ditunjukkan hasil perhitungan pada tabel IV.6. Artinya, terdapat perbedaan pada setiap tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Gajahmungkur terhadap tingkat partisipasinya dalam Musrenbang. Hal ini tercermin dari hasil survei primer terhadap 96 responden yang mewakili karakteristik penduduk Kecamatan Gajahmungkur, bahwa tingkat pendidikan penduduk berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka, sebab nilai *Chi-Square* hitung lebih besar dari nilai *Chi-Square* tabel dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 18,017 sedangkan nilai *Chi-Square* tabel dengan derajat bebas 16 adalah 12,6. Besarnya hubungan dan perbedaan dapat dilihat dari nilai koefisien kontingensi sebesar 0,361 dalam skala 1, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang rendah (Sugiyono,1999:216) dengan tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang. Meskipun tingkat pendidikan dengan partisipasi memiliki hubungan yang rendah, akan tetapi tingkat pendidikan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur. Hubungan dan perbedaan ini dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini:



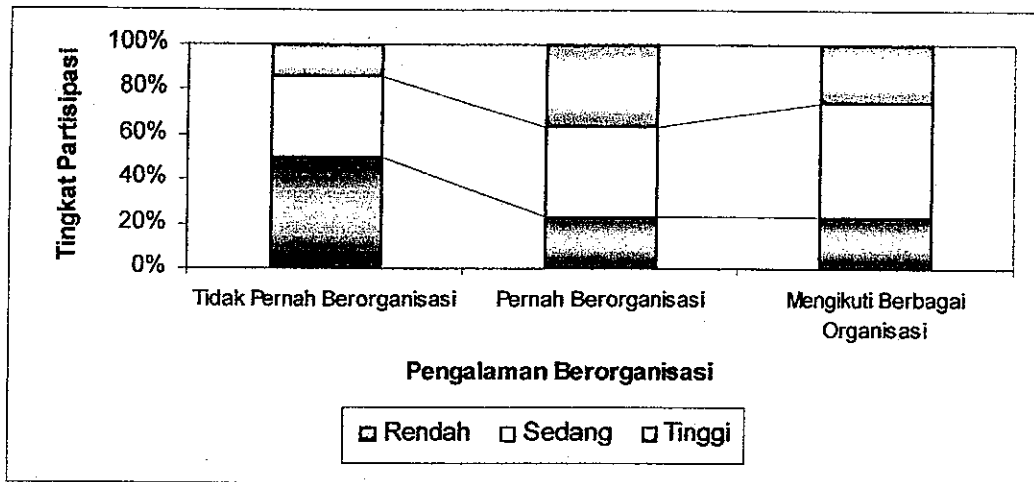
Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 4.16**  
**HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG**

Gambar 4.16 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat partisipasi penduduk dengan tingkat pendidikan, dimana pada gambar terlihat peningkatan pendidikan penduduk menyebabkan persentase tingkat partisipasi penduduk yang sedang dan tinggi cenderung meningkat dan tingkat partisipasinya cukup tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi penduduk dengan tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Gajahmungkur.

#### 4.4.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pengalaman Berorganisasi

Pembahasan mengenai ada tidaknya hubungan antara karakteristik penduduk dengan tingkat partisipasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan perbedaan antara pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur dengan tingkat partisipasi seperti yang terlihat pada tabel IV.6. Artinya, terdapat perbedaan pada setiap pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur terhadap tingkat partisipasinya dalam Musrenbang. Hal ini tercermin dari hasil survei primer yang telah dilakukan terhadap 96 responden, bahwa tingkat pendapatan responden berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka, sebab nilai *Chi-Square* hitung lebih besar dari nilai *Chi-Square* tabel dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 24,181 sedangkan nilai *Chi-Square* tabel dengan derajat bebas 8 adalah 15,5. Besarnya hubungan dan perbedaan dapat dilihat dari nilai koefisien kontingensi sebesar 0,410 dalam skala 1, yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman berorganisasi penduduk memiliki hubungan yang sedang (Sugiyono, 1999:216) dengan tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang. Hubungan dan perbedaan ini dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini:



Sumber : Hasil Analisis, 2005

**GAMBAR 4.17**  
**HUBUNGAN PENGALAMAN BERORGANISASI**  
**DENGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM MUSRENBANG**

Gambar 4.17 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pengalaman berorganisasi penduduk dengan tingkat partisipasinya, dimana pada gambar terlihat keaktifannya dalam berorganisasi penduduk menyebabkan persentase tingkat partisipasi penduduk cenderung meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan pengalaman berorganisasi di Kecamatan Gajahmungkur.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Temuan Studi**

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis, serta tanggapan penduduk yang diperoleh dari hasil survei yang telah dilakukan mengenai tingkat partisipasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang, maka diperoleh beberapa temuan studi. Adapun temuan studi tersebut adalah :

- Pada dasarnya mereka mendukung adanya Musrenbang, akan tetapi adanya berbagai faktor menyebabkan mereka kurang aktif dalam Musrenbang. Hal ini tercermin dari hasil analisis yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur, bahwa tingkat partisipasi mereka adalah sedang.
- Sedang-nya tingkat partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh tingkat keterlibatan mereka dalam proses Musrenbang yang dipengaruhi adanya perbedaan akan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman berorganisasi penduduk. Akan tetapi pada dasarnya keterlibatan penduduk Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik dalam Musrenbang yang tercermin dari prosentase kehadiran dan keaktifan warga, dimana lebih dari 50% penduduk Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik dalam menanggapi Musrenbang.
- Saat ini, penduduk Kecamatan Gajahmungkur telah memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari pemerintah dan memperoleh informasi mengenai proses pembangunan di lingkungannya, akan tetapi belum berperan serta aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur masih berada pada



tahap *infoming dan consultation*. Sedangkan untuk mencapai tahapan *Partnership* dalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur ini masih cukup sulit, dimana adanya berbagai faktor yang menyebabkan penduduk masih kurang aktif dan terlibat dalam proses perencanaan. Selain itu, pemerintah masih memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan sehingga pemerintah dan masyarakat tidak bisa memiliki kedudukan yang sama dalam segala bentuk perencanaan di Kecamatan Gajahmungkur.

- Perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan pengalaman berorganisasi penduduk Kecamatan Gajahmungkur yang berbeda sangat mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam proses pembangunan. Dengan adanya perbedaan tingkat pendapatan penduduk di Kecamatan Gajahmungkur, maka terlihat perbedaan tingkat partisipasi mereka dalam Musrenbang, dimana peningkatan tingkat pendapatan penduduk menunjukkan kecenderungan peningkatan pada tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan penduduk juga menyebabkan tingkat partisipasi yang berbeda, dimana adanya peningkatan pendidikan penduduk di Kecamatan Gajahmungkur. Variabel lain yang menyebabkan sedangnya tingkat partisipasi penduduk di Kecamatan Gajahmungkur adalah pengalaman berorganisasi penduduk, dimana penduduk yang tidak pernah mengikuti organisasi lebih cenderung untuk tidak hadir dan tidak aktif dalam Musrenbang, sedangkan penduduk yang pernah mengikuti organisasi dan yang mengikuti berbagai organisasi cenderung hadir dan aktif dalam Musrenbang.

## 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur memiliki tingkat partisipasi sedang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikator dalam mekanisme Musrenbang yang berupa kehadiran dan keaktifan penduduk dalam menentukan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda, mempersiapkan bahan dan materi, mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang, serta melakukan Musrenbang. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah :

- Pada tahapan menentukan fasilitator dan mempersiapkan bahan dan materi Musrenbang, sebagian besar warga hadir dan tidak aktif dalam menentukan fasilitator. Sedangkan dalam penyusunan jadwal dan agenda, sebagian besar warga tidak hadir. Demikian pula halnya pada tahapan mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat serta melakukan Musrenbang, dimana sebagian besar warga tidak menghadiri proses ini. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Gajahmungkur dalam Musrenbang menjadi sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Gajahmungkur masih kurang memahami dan menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan, dimana kehadiran dan keaktifan mereka dalam proses ini sangat menunjang keberhasilan pembangunan.
- Variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur ini disebabkan oleh perbedaan yang ada dalam karakteristik penduduknya, dimana karakteristik penduduk yang mempengaruhi yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman berorganisasi mereka. Hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat pendapatan penduduk

Kecamatan Gajahmungkur ini telah tercermin pada bab sebelumnya. Terdapatnya perbedaan tingkat pendapatan mereka akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam Musrenbang. Kecenderungan peningkatan tingkat pendapatan penduduk di Kecamatan Gajahmungkur ini menunjukkan kecenderungan peningkatan tingkat partisipasinya. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi penduduk dalam Musrenbang di Kecamatan Gajahmungkur, dimana terdapatnya peningkatan tingkat pendidikan penduduk akan memberikan peningkatan tingkat partisipasinya dalam proses pembangunan. Demikian pula hanya terhadap pengalaman berorganisasi penduduk di Kecamatan Gajahmungkur, dimana penduduk yang lebih berpengalaman dan mengikuti berbagai organisasi lebih menunjukkan tingkat partisipasinya lebih tinggi.

- Dalam penelitian ini, variabel yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman berorganisasi. Hal ini sesuai dengan beberapa literatur dan studi lain mengenai partisipasi masyarakat, dimana menurut Drs. Slamet M.Sc. dalam bukunya yang berjudul pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi, menyatakan bahwa studi kasus partisipasi masyarakat di Kota Surakarta terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian pula halnya dengan studi kasus di IOWA, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengalaman berorganisasi penduduk juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Slamet, 1993).

### **5.3 Rekomendasi**

#### **A. Bagi Pemerintah Kota**

- Hasil dari studi yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pembangunan adalah sedang menyebabkan proses pembangunan dan hasilnya di Kecamatan Gajahmungkur kurang optimal dan berhasil guna. Hal ini perlu ditindaklanjuti dan diperlukan intervensi dari instansi terkait untuk memberikan pengenalan, arahan, pelatihan, dan penyadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan pada masa selanjutnya, mereka akan aktif dan berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan.
- Studi ini dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di daerah lain, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih terarah, dan pembangunan akan menjadi optimal, berhasil, dan berdayaguna..

#### **B. Bagi Masyarakat**

Adanya keterbatasan instansi terkait akan pengenalan, penyediaan informasi, dan pelatihan partisipasi masyarakat dan proses penjangkaran aspirasi masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat ditanggapi oleh masyarakat dengan cara lebih menyadari arti pentingnya proses partisipasi dalam pembangunan.

#### **C. Bagi Pembangunan Ilmu Pengetahuan**

Studi ini dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di daerah lain dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih terarah, dan pembangunan akan menjadi optimal, berhasil, dan berdayaguna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Buku

- Abbott John, 1996, *Sharing the City Community Participation in Urbant Development* : London Earthscan Publication Ltd.
- Bratakusumah Riyadi Deddy Supriady, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, 2003, *Mencari akar Kultural Civil Society di Indonesia*, INCIS
- Burke Edmund M, 2004, *Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota* : Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Conyers Diana, 1994, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar* : UGM.
- Chandra Eka, 2003, *Membangun Forum Warga Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil* : Akatiga
- Daniel Selener, 2001, *Participatory Action Research And Social Change*, (tidak tercatat)
- Kartasmita Ginanjara, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*: Cides.
- Kountour, D.M.S, Ronny, 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* : PPM.
- Mikkelsen Britha, 2003, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Prijono Onny S, 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*: CSIS
- Yin Robert K, 2004, *Studi Kasus Desain Dan Metode*, Rajawali Pers.
- Sudriamunawar Haryono, 2002, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan* : Mandar Maju.

- Sunarsih, 2003, *Statistika Lingkungan*, :Program Magister Ilmu Lingkungan Undip.
- Sulistiyani Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan*, :Gaya Media.
- Surjadi A, 1979, *Pembangunan Masyarakat Desa* : Alumni Bandung.
- Slamet Y, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* : Sebelas Maret University Press Surakarta.
- Schubeler Peter, 1996, *Participation and Partnership in Urbant Infrastructure Management*: Urban Management Programme by The World Bank
- Sumarto Hertifah Sj, 2004, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*: Yayasan Obor Indonesia.
- Tayibnapis Farida Yusuf, 2000, *Evaluasi Program* : Rineka Cipta.
- T. Moeljarto , 1995, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Wexley Keneth N, 2003, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalialia*, Rineka Cipta.

#### **B. Kelompok Buku Peraturan**

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 (RTRW), 2000  
: RencananPemerintah Kota Semarang.
- Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota II (BWK II) Kecamatan Candisari dan Gajah Mungkur Tahun 2000 – 2010 : 2000, Rencana Pemerintah Kota Semarang  
Kota Semarang.
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrembang dan Perencanaan Partisipatif Daerah Nomor : 1354/M.PPN/03/2004.
- Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 Seri E, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).